

PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA PERBANKAN

HERI SEPTIAWAN

8105097362



Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI

KONSENTRASI PENDIDIKAN AKUNTANSI

JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2016

THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM AND OWNERSHIP STRUCTURE AGAINST BANK PERFORMANCE

HERI SEPTIAWAN

8105097362



**This is Written As One Of The Requirements For Getting a Bachelor Degree of
Economics**

ECONOMIC EDUCATION COURSES

ACCOUNTING EDUCATION CONCENTRATION

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND ADMINISTRATION

THE FACULTY OF ECONOMICS

STATE UNIVERSITY OF JAKARTA

2016

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus
NIP. 196712071992031001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Santi Susanti, S.Pd, M.Ak</u> NIP. 19770113 200501 2 002	Ketua	
2. <u>Erika Takidah, SE., M.Si</u> NIP. 19751111 200912 2 001	Sekretaris	
3. <u>Ratna Anggraeni, SE., M.Ak</u> NIP. 19740417 200012 2 001	Penguji Ahli	
4. <u>M. Yasser Arafat, SE, MM</u> NIP. 19710413 200112 1 001	Pembimbing I	
5. <u>Susi Indriani, M.S.Ak</u> NIP. 19760820 200912 2 001	Pembimbing II	

Tanggal Lulus: 28 Januari 2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan secara sadar serta apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 28 Januari 2016



Heri Septiawan
No. Reg 8105097362

Abstrak

Heri Septiawan. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perbankan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* (CG) dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan. Sebagai industri yang memiliki regulasi, penelitian ini ingin membuktikan bahwa kinerja keuangan perbankan dapat dipengaruhi oleh penerapan CG dan struktur kepemilikannya, bukan hanya sebagai pemenuhan regulasi ketentuan perbankan. Sampel penelitian ini adalah industri perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan rasio ROA. Proksi dalam mekanisme CG menggunakan proporsi komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit serta kepemilikan institusional dalam proksi struktur kepemilikan. Hasil penelitian menemukan mekanisme CG dan struktur kepemilikan secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Secara parsial, komisaris independen dan kepemilikan institusional menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap ROA, sedangkan dewan direksi dan komite audit positif berpengaruh terhadap ROA.

Kata kunci: GCG, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, struktur kepemilikan, ROA.

Abstract

Heri Septiawan. *The Influence of Corporate Governance and Ownership Structure Against Bank Performance*. State University of Jakarta. 2016

This research is aimed to find out the influence of Corporate Governance (CG) mechanism and the ownership structure against banking financial performance. As a industry that has regulations, this research wants to prove that the banking financial performance can be influenced by CG mechanisme and ownership structure, not just it's compliance to the banking regulations. The samples in this research are the banks who registered in BEI 2011-2013 periods. The financial performance of the banks is measured by ROA. CG mechanism are measured by it's proportion independent commissioner, board of directors, audit committee and the ownership structure by ownership spread proxy. This research finds the CG mechanism and owner structure simultaneously influence the ROA ratio. The independent commissioner and institutional ownership partially show nothing to the ROA ratio, meanwhile the boards of director and audit committee shows a positive influence towards the ratio of ROA.

Keywords : GCG, independent commissioner, board of director, audit committee, ownership structure, ROA.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang tak pernah henti mencurahkan segala bentuk kasih sayang-Nya. Dengan perjuangan yang tak kenal menyerah serta diiringi doa maka skripsi yang berjudul “PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA PERBANKAN (Studi Kasus Pada Perbankan Periode 2011-2013)” dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini disusun dengan maksud dan tujuan yakni sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pantas kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
2. Dr. Dedi Purwana ES,M.Bus selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
3. Drs. Nurdin Hidayat, MM, M.Si selaku kepala jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
4. Dr. Siti Nurjanah, S.E, M.Si selaku kepala program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

5. M. Yasser Arafat, S.E, MM, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bantuan dan masukan terhadap penulisan skripsi.
6. Susi Indriani, M.S.Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bantuan dan masukan dalam penulisan skripsi.
7. Seluruh dosen-dosen Fakultas Ekonomi khususnya yang telah mengajarkan banyak hal kepada peneliti serta memberikan masukan atas penelitian.
8. Sodara-Sodari dan Tablo sebagai orang-orang yang dekat dengan saya yang selalu memberi dorongan agar saya terpacu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Akuntansi Angkatan 2009 beserta teman-teman lainnya yang telah banyak membantu saya.
10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah turut membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Atas segala kekurangan dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini penulis mohon maaf.

Jakarta, Januari 2016

Heri Septiawan

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Perumusan Masalah	11
E. Kegunaan Penelitian	12
BAB II. KERANGKA TEORETIK	
A. Deskripsi Konseptual	
1. Kinerja	13
1.1 Pengertian Kinerja.....	13
1.2 Pengukuran Kinerja Keuangan.....	14

2. <i>Corporate Governance</i>	18
2.1 Pengertian <i>Corporate Governance</i>	18
2.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	25
2.3 Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	27
2.4 Indikator Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	28
2.5 Implementasi Prinsip-Prinsip GCG Dalam Bidang Perbankan	31
3. Struktur Kepemilikan	32
3.1 Kepemilikan Manajerial	34
3.2 Kepemilikan Institusional	35
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	37
C. Kerangka Teoretik	40
D. Perumusan Hipotesis Penelitian	42
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	43
B. Waktu Penelitian	43
C. Metode Penelitian	43
D. Populasi dan Sampling	43
E. Teknik Pengumpulan Data	45
1. <i>Corporate Governance</i>	
1.1 Definisi Konseptual.....	45
1.2 Definisi Operasional.....	45
2. Kinerja	

2.1. Definisi Konseptual.....	47
2.2 Definisi Operasional.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	48
3.1 Uji Normalitas.....	48
3.2 Uji Multikolinieritas	49
3.3 Uji Heteroskedastisitas	50
3.4 Uji Autokorelasi	50
3.5 Analisis Regresi Linier Berganda	51
3.6 Uji F	52
3.7 Uji t	52

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	54
B. Statistik Deskriptif	55
C. Uji Asumsi Klasik	65
1.1 Uji Normalitas	65
1.2 Uji Multikolinieritas.....	66
1.3 Uji Heteroskedastisits.....	67
1.4 Uji Autokorelasi	67
D. Analisis Regresi Linier Berganda.....	69
1.5 Uji F	69
1.6 Uji t	70
E. Pembahasan	74

BAB V. KESIMPULAN IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan	80
B. Implikasi	81
C. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:	Judul	Halaman
1.	Daftar Kode Bank.....	83
2.	Indikator X dan Y.....	84
3.	Hasil Olah Data	88
4.	Perhitungan Data Histogram	92
5.	ICMD	94
6.	Laporan Keuangan	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
II.1	Hubungan GCG dan <i>Good end Results</i>	25

DAFTAR TABEL

4.1 Distribusi Frekuensi Komisaris Independen	55
4.2 Distribusi Frekuensi Dewan Direksi.....	57
4.3 Distribusi Frekuensi Komite Audit	58
4.4 Distribusi Frekuensi Kepemilikan Institusional.....	60
4.5 Distribusi Frekuensi ROA	61
4.6 Statistik Deskriptif	63
4.7 Uji Normalitas	65
4.8 Uji Multikolinearitas	66
4.9 Uji Autokorelasi.....	67
5.0 Uji F	69
5.1 Uji t	70

DAFTAR GRAFIK

4.1 Histogram Komisaris Independen	56
4.2 Histogram Dewan Direksi.....	57
4.3 Histogram Komite Audit	59
4.4 Histogram Kepemilikan Institusional.....	60
4.5 Histogram ROA	62
4.6 Grafik Scatterplot.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan Indonesia terus menunjukkan kinerja gemilang. Dalam lima bulan pertama 2013, bank-bank umum di Indonesia meraup laba bersih Rp29,5 triliun, naik 21,4% dibanding periode 2012 yang tercatat Rp24,3 triliun. Setelah di dera krisis moneter pada 1997/1998, kini industri perbankan nasional berubah menjadi lebih mengkilat. Para investor asing pun banyak melirik sektor ini sebagai ladang investasi. Hingga Mei 2013, semua indikator perbankan nasional menunjukkan kinerja yang menggembirakan.

Kinerja perbankan yang menggembirakan itu dapat dilihat dari sisi permodalan, likuiditas, rasio kredit bermasalah (NPL), dan pertumbuhan kredit. Rasio kredit terhadap simpanan (*Loan to Deposit Ratio/ LDR*) tercatat 78,45% dan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) 1,41%. Data Bank Indonesia ini menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan kredit telah mendorong pendapatan bunga bersih. Hingga Mei 2013, jumlah kredit yang tersalurkan mencapai Rp1.889,4 triliun, naik 23,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2012 sebesar Rp1.531,5 triliun. Dari 161 bank umum, per Mei 2013, total aset mereka mencapai Rp3.136,4 triliun.¹

¹ Ekonomi.metrotvnews.com (27 Juli 2014)

Publik berharap pelaku bisnis di sektor ini mampu mempertahankan prestasi ini. Para pengelola bank tidak boleh berpuas diri dan terlena dengan kinerja yang gemilang ini. Para bankir masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menggerakkan perekonomian negeri ini. Maklum, masyarakat masih memimpikan industri perbankan nasional yang efisien. Jika perbankan efisien, masyarakat pun berharap bisa menikmati suku bunga kredit yang lebih rendah.

Memang masyarakat tidak bisa memaksa bank-bank untuk segera menurunkan suku bunga kredit. Bank tentu memiliki dasar perhitungan yang matang sebelum memutuskan untuk memangkas suku bunga. Namun masyarakat percaya bankir pun menyadari suku bunga kredit yang tinggi bagus untuk perekonomian nasional. Meski demikian, para bankir di Indonesia perlu pula memperhatikan sepak terjang para kompetitor di negara lain. Ambil contoh hasil survei Pricewaterhouse Cooper (PwC) Indonesia, yang menemukan fakta bahwa industri perbankan nasional masih menghadapi masalah efisiensi biaya operasional.

Efisiensi perbankan di Indonesia merupakan salah satu yang terburuk di Asia Tenggara. Perbankan nasional rata-rata mendapatkan bunga bersih (*Net Interest Margin/ NIM*) sekitar 6%, jauh di atas rata-rata NIM di kawasan Asean yang berkisar 3%-4%.² Kalau pun masyarakat tidak bisa menyalahkan bankir sepenuhnya atas tingginya NIM tersebut, namun menjadi bahan perenungan bagi para bankir untuk mengupayakan NIM yang moderat. Di tengah tekanan inflasi ke

² Businessnews.co.id (27 juli 2014)

depan lebih besar, tentu ini menjadi pekerjaan berat bagi Bank Indonesia dan perbankan nasional untuk menjaga kestabilan suku bunga.

Apabila tingkat risiko bisnis di negeri ini terbilang masih tinggi. Alhasil, kalangan perbankan mau tak mau harus menambah premi risiko dalam penetapan suku bunga kreditnya. Ujung-ujungnya suku bunga kredit akan bergerak naik mengikuti irama risiko yang bergejolak. Juga harus disadari, kendati risiko kredit bermasalah (NPL) *gross* masih terjaga pada kisaran 3%, namun tekanan atas risiko kredit tetap menjadi risiko utama yang harus dikelola para bankir.

Ketika pasar kredit semakin ketat, mau tak mau, perbankan akan menurunkan NIM-nya, dimana suku bunga kredit akan dipangkas. Sebaliknya, persaingan ketat telah terjadi di pasar dana pihak ketiga (DPK). Untuk mendapatkan DPK, perbankan terpaksa menawarkan suku bunga simpanan yang menarik atau memberikan iming-iming hadiah menawan. Lebih-lebih deposan besar acapkali meminta bunga khusus (*special rate*) yang membebani bank karena biaya dana (*cost of fund*) menjadi melonjak. Para pengelola bank harus memperhatikan kekuatan diri, terutama terkait permodalan dan ekspansi jaringan. Bagaimanapun, untuk menjangkau pasar yang begitu luas, perbankan butuh dukungan modal dan jaringan.

Keterbatasan modal jelas akan memperhatikan kekuatan diri, terutama terkait permodalan dan ekspansi kredit dan memperbarui teknologi. Permintaan terhadap dana perbankan kian meningkat seiring dengan target pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Diharapkan para pengelola bank semakin serius dan

disiplin memupuk permodalan agar mampu menjangkau potensi pasar domestik yang besar ini.

Dalam hal ini, bank bukan saja bisa menjual produk berupa dana dan kredit, melainkan juga layanan yang berorientasi pada pendapatan bukan bunga (*Fee Based Income* atau FBI). Dengan semakin tingginya FBI, otomatis memberikan ruang bagi bank menurunkan suku bunga kredit karena pendapatan bunga kredit (*interest income*) bisa dikompensasikan oleh FBI yang kian membesar.³ Kinerja perbankan memang suka mengalami pasang surut, setelah terkuaknya kasus Bank Century, pada saat itu banyak nasabah yang menaruh kurangnya rasa percaya kepada bank. Padahal sebagai perusahaan yang dekat dengan masyarakat (nasabah) seharusnya bank memiliki sikap transparan dalam menjalankan perusahaannya sehingga tidak menimbulkan rasa kurang percaya dari masyarakat. Untuk itu perlunya BI di dalam meningkatkan pengawasannya kepada bank-bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dunia perbankan akan terus mendapat kredibilitas yang baik dari masyarakat.

Lambatnya pemulihan ekonomi kawasan eropa dan Amerika Serikat merupakan masalah serius yang harus diidentifikasi oleh perbankan indonesia. Jalur perdagangan dan keuangan ditenggarai menjadi faktor utama menjalarnya eksekrisis ekonomi dunia terhadap perekonomian indonesia sistem perekonomian indonesia yang bersifat terbuka menjadi pintu masuk efek krisis keuangan AS dan krisis utang eropa. Sinyal ini sudah dengan jelas ditangkap dari melambatnya

³Riaupos.co (23 Juli 2014)

permintaan barang-barang ekspor dari dua kawasan tadi. Hasilnya, bank yang melayani keperluan transaksi ekspor dan impor bagi nasabahnya tentu terkena dampak negatifnya. Tak terkecuali adalah ancaman kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) yang disebabkan seretnya permintaan barang-barang ekspor yang membuat kemampuan membayar (*Repayment Capacity*) dari debitur yang berorientasi ekspor terganggu.

Sejauh ini memang perkembangan kredit perbankan ditandai dengan kenaikan NPL yang tipis pada awal tahun ini. NPL meningkat sekitar 4% atau sebesar Rp2,06 triliun dari Rp49,36 triliun pada akhir februari 2013 menjadi Rp51,42 triliun per akhir februari tahun ini. Namun, persentase itu lebih rendah dibandingkan tahun lalu seiring dengan kucuran kredit yang naik mencapai Rp2.203 triliun per februari. Bandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya tercatat Rp1.773 triliun. Kredit bermasalah terdiri atas kredit rupiah sebesar Rp1.844 triliun dan kredit valuta asing sekitar Rp358,6 triliun. Melihat kecenderungan NPL tersebut, BI optimis target pertumbuhan kredit yang dipatok berkisar 25-27% bakal terealisasi tahun ini meski kalangan perbankan memasang target konservatif sekitar 22-23%. Penetapan target pertumbuhan kredit yang lebih besar dari Rencana Bisnis Bank (RBB) didasari dengan pertumbuhan kredit tahun lalu yang mencapai 24,5%, prediksi inflasi yang masih rendah, dan nilai tukar rupiah yang cenderung tidak

fluktuatif.⁴ Prediksi pertumbuhan kredit ini diharapkan dapat membuat dunia perbankan lebih sehat di dalam menjalankan kegiatan perusahaannya.

Kepemilikan saham dan intervensi pemerintah terhadap perbankan berpengaruh buruk terhadap kinerja perbankan nasional. Pengaruh kepemilikan saham pemerintah pada bank hanya berpengaruh positif pada *Net Interest Margin* (NIM), sedangkan pada *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Capital Adequency Ratio* (CAR), serta *Loan to Deposit Ratio* (LDR) justru berdampak negatif.

Eko Budiwiyo menegaskan, intervensi pemerintah di bank BUMN terjadi dalam bentuk KKN. Kegiatan yang sering diintervensi oleh pemerintah dalam hal perekrutan karyawan, penentuan komisaris dan direksi, pengadaan barang dan jasa, serta penyaluran kredit. Intervensi menyebabkan manajemen bank tidak berjalan secara optimal karena merusak gaya kepemimpinan dan budaya kerja, sehingga kinerja bank dapat mengalami stagnansi dan bahkan menurun.

Berdasarkan penelitian beliau terhadap 121 bank, faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja perbankan adalah sumberdaya manusia. Menurutnya, rasio beban personalia terhadap beban operasional sebagai proksi perhatian bank terhadap SDM menunjukkan pengaruh positif semua ukuran kinerja. Ukuran kinerja yang memberikan respon paling besar terhadap faktor SDM adalah LDR, kemudian CAR, ROE, NIM, dan ROA. Temuan ini menunjukkan industri perbankan dan

⁴Infobanknews.com 24 april 2012

otoritas moneter perlu memusatkan perhatian pada upaya meningkatkan kompetensi dari SDM yang terlibat dalam industri perbankan.

Dia menganjurkan pemerintah mengurangi kepemilikan sahamnya di perbankan nasional dan menyerahkannya kepada pihak-pihak yang mampu mengelola bank secara profesional. Selain dikurangi secara bertahap, pengurangan kepemilikan tersebut harus ditempuh dengan memperhatikan regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan mekanisme yang tepat sehingga pelepasan saham dapat memberikan hasil yang maksimal.⁵ Hasil yang maksimal ini tentunya mesti lepas dari intervensi pemerintah, karena seharusnya pemerintah tidak terlalu mencampuri industri perbankan ini karena industri ini diharapkan menjadi industri yang transparan kepada publik.

Setelah krisis ekonomi 1997-1998, banyak usaha yang bisnisnya menjadi macet, sehingga ini juga menyebabkan makin banyaknya kredit macet yang membuat beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas ini makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana secara besar-besaran (*rush*).

Goncangan yang terjadi pada satu bank tentu saja juga akan menimbulkan guncangan lebih besar pada sistem perbankan secara umum, sehingga perekonomian juga akan terseret ke jurang kehancuran. Oleh karena itu, sejak 2006 Bank Indonesia (BI) mewajibkan perbankan melaksanakan GCG, sehingga bisnis perbankan bisa sehat. Hal itu termaktub dalam PBI 8/4/2006 untuk pelaksanaan

⁵Suaramerdeka.com 04 oktober 2011

GCG bagi bank umum guna meningkatkan *compliance* terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan. Hal itu juga karena BI menyadari bahwa dulu pengelolaan industri perbankan itu buruk, menyusul adanya liberalisasi tanpa peraturan dan pengawasan ketat. GCG telah pula dikukuhkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai pilar keempat dengan landasan berpikir bahwa aplikasi GCG akan memperkuat kondisi internal perbankan nasional.⁶ Untuk itu diharapkan bahwa prinsip-prinsip GCG (*TARIF/Transperancy, Accountability, Reliability, Independency, Fairness*) dapat dijalankan dengan baik oleh industri perbankan, sehingga mampu menjadi industri yang memiliki nilai baik di mata masyarakat.

Bank Indonesia mengakui kasus perbankan yang terjadi akhir-akhir ini karena tata kelola (*Good Corporate Governance/GCG*) bank tidak berjalan baik. Untuk itu, BI akan meninjau ulang struktur kepemilikan bank di Indonesia.

"Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap performa perbankan. BI akan meninjau kembali struktur kepemilikan bank meski ini masih dalam perdebatan," ujar Deputy Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, di Jakarta, Rabu, 22 Juni 2011.

Menurut dia, kasus yang terjadi akhir-akhir ini merupakan kesempatan bagi BI untuk introspeksi guna menegakkan GCG di perbankan. Dalam GCG, lanjut

⁶Neraca.co.id (08/01/2012)

Halim, terdapat integritas, keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran, yang menjadi pertahanan lapis utama perbankan. "Ini penting, karena tanpa GCG industri perbankan tidak akan mendapat kepercayaan publik," ujarnya.

"Perbaikan prospek ekonomi tidak lepas dari peran pemerintah maupun perbankan," kata Halim.

Aturan yang akan bernama Aturan Penataan Struktur Kepemilikan Bank itu sebelumnya banyak disebut-sebut dengan istilah aturan kepemilikan saham mayoritas. Bank Indonesia (BI) menyatakan aturan yang bertujuan menata ulang struktur kepemilikan bank bakal dikeluarkan pada akhir Juli 2012.

Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah menegaskan, aturan yang akan bernama Aturan Penataan Struktur Kepemilikan Bank itu sebelumnya banyak disebut-sebut dengan istilah aturan kepemilikan saham mayoritas atau pembatasan kepemilikan saham. "Sebetulnya aturannya sudah diputus di Rapat Dewan Gubernur. Akhir Juli mudah-mudahan sudah bisa dioperasionalkan," kata Halim, dalam Diskusi Panel: Peta Persaingan Perbankan Pasca Pembatasan Saham Mayoritas di Bogor, Minggu (24/6) malam.⁷ Seperti diketahui, bank sentral akan mengatur kepemilikan saham perbankan, yang dikaitkan dengan tingkat kesehatan masing-masing bank. Berdasarkan beleid tersebut, investor lembaga keuangan

⁷ Jakarta Globe (25 juni 2012)

(termasuk bank) bisa memiliki maksimal 40%, badan hukum non lembaga keuangan dengan batas maksimal 30%, sementara untuk investor perorangan batas maksimal kepemilikan 20%.

"Kami akan memberikan waktu transisi tiga kali masa penilaian tingkat kesehatan bank (1,5 tahun) agar bank bisa memperbaiki tingkat kesehatannya, jadi sampai Desember 2013. Ini hanya berlaku saat aturan baru dikeluarkan. Nanti lewat itu, bila ada penurunan tingkat kesehatan di bawah level dua akan langsung dikenakan, jadi harus divestasi saham," papar Halim.

Halim menjelaskan, BI akan langsung mengenakan aturan tersebut kepada bank yang selama 1,5 tahun tidak bisa menaikkan tingkat kesehatannya ke level dua. Adapun yang menjadi aspek BI dalam penilaian tingkat kesehatan bank adalah profil risiko, tata kelola, permodalan, begitu pula rentabilitas, dan profitabilitas.

"Untuk investor lama, agar tidak kena aturan ini, harus memenuhi semua aspek tersebut secara baik. Ini yang paling utama kita nilai *good corporate governance* (GCG), harus di level dua. Sebab, perilaku (tata kelola) bank ini penting terhadap keamanan banknya," tandas Halim. Pentingnya mekanisme corporate governance serta didampingi oleh struktur kepemilikan yang baik memang di harapkan dapat memperbaiki kinerja perbankan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan beberapa hal yang mempengaruhi kinerja perbankan, diantaranya:

1. Rendahnya tingkat efisiensi kegiatan operasional.
2. Keterbatasan modal.
3. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil.
4. Intervensi yang berlebihan oleh pemerintah.
5. Rendahnya mekanisme *corporate governance*.
6. Struktur kepemilikan yang masih lemah.

C. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan keterbatasan dana dan waktu bagi peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada masalah “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perbankan (studi kasus pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 - 2013). Dengan indikator dari mekanisme GCG yakni proporsi komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit, sedangkan struktur kepemilikan diukur dengan kepemilikan institusional. Serta indikator kinerja diukur oleh *return on asset* (ROA).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan perumusan sebagai berikut : “Apakah ada hubungan antara mekanisme *corporate governance*, struktur kepemilikan dengan kinerja perbankan?”

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti tentang pentingnya *corporate governance* pada dunia perbankan. Bagi peneliti lain, sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan *corporate governance* dengan kinerja.

2. Praktis

Sebagai bahan informasi dan referensi pada pihak perbankan untuk menjalankan mekanisme *corporate governance* sebaik mungkin agar dapat mendapatkan hasil yang sebaik mungkin dari *good corporate governance* tersebut. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perbankan.

BAB II

PENYUSUNAN DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Deskripsi Konseptual

1. Kinerja

1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja menurut Bernardin dan Russel (dalam Ruky) memberikan pengertian kinerja sebagai berikut: *“performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period”*. Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu.¹

Istilah kinerja atau *performance* merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Disamping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya (IAI, dalam Hakim).

¹Ruky, Ahmad S. *Sistem manajemen kinerja*, (Jakarta; Gramedia pustaka utama, 2009) hal.15

Payaman Simanjuntak mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.

Mahsun berpendapat bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi yang tertuang dalam perencanaan strategi organisasi.

Indra Bastian mengatakan bahwa: gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan penskemaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.²

Jadi, kinerja adalah hasil yang akan dicapai oleh suatu entitas bisnis di dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya berdasarkan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut pada awal periode dan hasilnya akan dilihat pada akhir periode yang bersangkutan.

1.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap *review* data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberikan solusi

²Bastian, Indra. Akuntansi sektor publik, (Jakarta; erlangga, 2005) hal.274

terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu menurut Jumingan³:

- a. Analisis perbandingan laporan keuangan, yang merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif).
- b. Analisis tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
- c. Analisis persentase per komponen (*common size*), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
- d. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
- e. Analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
- f. Analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
- g. Analisis perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
- h. Analisis *break even*, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Rifai berpendapat bahwa pengukuran kinerja hendaknya menggunakan atau mengintegrasikan dimensi pengukuran yang beragam, sampai saat ini masih muncul perdebatan tentang pendekatan yang tepat bagi konseptualisasi dan pengukuran kinerja organisasi sehingga untuk menjamin tercapainya kinerja tersebut, para manajer harus merancang ukuran-ukuran hasil yang diinginkan.

³Jumingan. Analisis laporan keuangan, (Jakarta; Bumi aksara, 2006) hal.242

Suatu pengukuran adalah nilai kuantitatif yang dapat digunakan untuk menjadi skala dan tujuan-tujuan perbandingan. Pengukuran kinerja dapat berupa keuangan dan bukan keuangan. Pengukuran keuangan dinyatakan dalam ketentuan moneter, sedangkan pengukuran bukan keuangan adalah data kuantitatif yang diciptakan diluar sistem akuntansi yang formal.

Pengukuran kinerja keuangan mempunyai arti penting bagi pengambilan keputusan baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat yang dijadikan acuan penilaian untuk meramalkan kondisi keuangan, operasi dan hasil usaha perusahaan.

Menurut Mahmud dan Halim, ukuran kinerja meliputi rasio-rasio berikut⁴:

- a. Rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih.
- b. Rasio aktivitas, mengukur sejauh mana efektifitas perusahaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset.
- c. Rasio solvabilitas, mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.
- d. Rasio profitabilitas, mengukur seberapa kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitabilitas).
- e. Rasio pasar, mengukur perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai pasar.

Rasio keuangan sebagai pengukuran kinerja keuangan dalam laporan keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk memprediksi laba bersih dan dividen pada masa yang akan datang. Cara yang digunakan untuk mendukung prediksi tersebut adalah dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisis tersebut mengkombinasikan hubungan

⁴Hanafi, Mahmud M dan Abdul Halim. Analisa laporan keuangan, (Yogyakarta; UPP YPKN, 2003) hal.75

antara komponen keuangan yang satu dengan komponen keuangan yang lain. Pada umumnya, hubungan tersebut dilihat dari rasio antara komponen-komponen keuangan yang satu dengan yang lain. Dalam konteks manajemen keuangan, analisis tersebut dikenal dengan analisis risiko keuangan. Analisis rasio ini berguna untuk membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain atau dengan membandingkan satu perusahaan pada tahun ini dengan tahun yang lainnya.

Menurut Hanafi, pada dasarnya analisis rasio keuangan di kelompokkan ke dalam empat macam, yaitu⁵:

a. Rasio likuiditas

Rasio ini mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan). Biasanya rasio yang digunakan adalah *current ratio*, *cash ratio*, dan *net working capital to total asset ratio*.

b. Rasio *leverage* (solvabilitas)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak *solvable* adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibanding total asetnya. Rasio *leverage* yang biasanya digunakan seperti *debt to total asset ratio*, *total debt to total capital asset ratio*, *total debt to equity ratio*, *long term to equity ratio*, dan lainnya.

c. Rasio aktivitas

Rasio ini melihat beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. Beberapa rasio yang digunakan misalnya: *total asset turnover ratio*, *receivable turnover ratio*, *inventory turnover ratio*, dan sebagainya.

d. Rasio keuangan (profitabilitas)

Rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan aset,

⁵Ibid. hal.77-88

dan modal saham tertentu pada periode tertentu. Beberapa rasio yang sering digunakan adalah *gross profit margin*, *net profit margin*, *return on asset* (ROA), dan sebagainya.

ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan ROA.

2. *Corporate Governance*

2.1 Pengertian *Corporate Governance*

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

Corporate governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik *corporate governance* terus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian atas *corporate governance* mulai disinggung pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepentingan saham dan

control. Pemisahan tersebut berimplikasi pada timbulnya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar (*dispersed ownership*).⁶

Pada akhir tahun 1980-an mulai banyak kesimpulan menyebutkan struktur kepemilikan dalam bentuk *dispersed ownership* akan memberikan dampak bagi buruknya kinerja manajemen. Untuk pertama kalinya, usaha untuk melembagakan *corporate governance* dilakukan oleh *Bank of England* dan *London Stock Exchange* pada tahun 1992 dengan membentuk *Cadbury Committee* (komite Cadbury), yang bertugas menyusun *corporate governance code* yang menjadi acuan utama di banyak negara.

Berikut beberapa teori menurut beberapa lembaga dan para ahli tentang *corporate governance*⁷:

1. Komite Cadbury mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

2. Supriyatno

⁶Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana, Penerapan *Good corporate governance*: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006) , h. 24

⁷Ibid. hal.25

Corporate Governance sebagai proses dan terstruktur yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lain.

3. OECD

Corporate Governance adalah sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan.

4. Syahkroza

Corporate Governance dapat diformulasikan dalam model-model *corporate governance* yang bersifat mainstream seperti *finance model (agency theory)*, *stewardship model (stewardship theory)*, *stakeholder model (stakeholders theory)* atau *political model (political theory)* serta *myopic market model*.

5. Monks

Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang dapat menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*.

6. Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002

Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.⁸

⁸Ibid. hal. 26

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah sebuah sistem yang bertujuan mengendalikan hubungan antara suatu pihak dengan pihak lainnya (dalam hal ini *stakeholder*) agar terciptanya kerjasama yang diinginkan oleh kedua belah pihak atau lebih yang bersangkutan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Misi perusahaan dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* pada umumnya perusahaan mencantumkan misi mereka untuk menjalankan putaran roda perusahaan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang diantaranya yaitu: *fairness, disclosure and transparency, accountability, and responsibility*. Jika suatu perusahaan benar-benar mampu menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut dan persepsi masyarakat luas mengakuinya dengan sepenuh hati, maka hal tersebut akan mampu mengangkat *image* perusahaan sehingga menjadi kekuatan dalam menghadapi persaingan. Hal ini sangat memungkinkan dapat terjadi karena prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* memiliki arti yang sungguh penting dalam membangun *image* suatu perusahaan dengan cara sebagai berikut⁹:

- A. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*. Sullivan dan Nurdin menjelaskan bahwa dengan

⁹ Arafat, Wilson. *Behind a powerful image*, (Yogyakarta; Andi, 2009) hal. 87-89

membangun *Good Corporate Governance* akan dapat memperbaiki kinerja perusahaan. Senada dengan Sullivan dan Nurdin, Riady menyatakan bahwa inti dari *Good Corporate Governance* adalah menciptakan perusahaan yang berhasil yang akan membentuk keunggulan komparatif. Karena dengan *Good Corporate Governance* maka manajemen perusahaan akan berjalan dengan baik, efisiensi akan berjalan dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan para *stakeholders*. Hal ini berkaitan erat pula dengan pembentukan *image* yang baik dari sebuah perusahaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Majalah Manajemen bahwa setelah proses *Good Corporate Governance* terbentuk dan berjalan dengan baik, maka akan terciptalah *image* sebagai sebuah perusahaan yang berhasil, yaitu meningkatkan *trust*. Lebih dari itu, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* memiliki arti yang begitu penting dalam rangka mewujudkan sebuah *sustainable company*. Kemudian dapat kita cermati pula bahwa *Good Corporate Governance* akan menuntun sebuah institusi ke arah keunggulan kompetitif yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif pada perkembangan ekonomi dan berarti pula menjamin kelanggengan kemakmuran yang akan dinikmati rakyat banyak. Meminjam pernyataan dari *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI) bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tidak lain merupakan katalisator untuk memacu timbulnya kehidupan yang lebih baik. Di sisi yang lain dapat pula kita

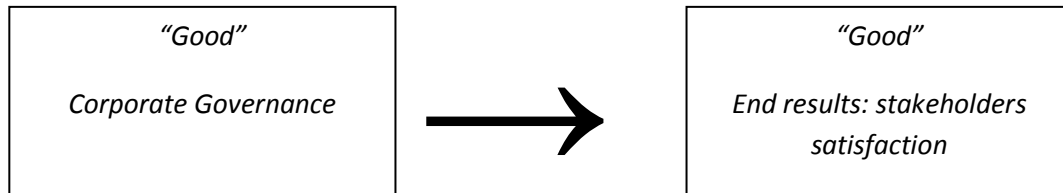
cermati bahwa lemahnya praktik *Good Corporate Governance* akan menyebabkan kehancuran kinerja sebuah perusahaan. Sebagaimana Ruru berpendapat bahwa ketiadaan faktor-faktor yang berkaitan dengan *fairness, transparency, accountability, responsibility, dan independency* dari pelaksanaan organ perusahaan (direksi, komisaris, pemegang saham) akan menyebabkan terpuruknya sebagian besar dunia usaha kita. Begitu pula Pardede menjelaskan bahwa secara *gambling* kita dapat melihat jika tidak ada *Good Corporate Governance* dalam sebuah perusahaan, maka daya saing itu akan menjadi lemah dan hanya sekadar mengikuti pola perkembangan pasar atau posisi pesaing-pesaing belaka, bukan suatu yang melekat sebagai sebuah keunggulan pada perusahaan itu sendiri.

- B. Meningkatnya *corporate value* sebagaimana yang diungkapkan oleh Tjager bahwa praktik *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri.
- C. Meningkatkan kepercayaan investor. Sebagaimana diungkapkan oleh Newell dan Wilson yang pada intinya menyatakan bahwa praktik *Good Corporate Governance* yang dapat dijalankan dengan baik akan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan sebaliknya pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang buruk akan menurunkan tingkat

kepercayaan mereka. Hal ini diperkuat dari hasil survey yang dilakukan McKinsey & Co bahwa *Good Corporate Governance* menjadi perhatian utama para investor menyamai kinerja finansial dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar yang sedang berkembang (*emerging markets*). Para investor tersebut cenderung menghindari perusahaan-perusahaan yang buruk dalam penerapan *Good Corporate Governance* dan *Good Corporate Governance* dipandang sebagai kriteria kualitatif penentu. Oleh karena itu tidak mengherankan jika para investor masih sulit atau tidak mempercayai pasar di Indonesia karena bangsa ini tergolong sebagai *worst performance* dalam hal penerapan *Good Corporate Governance*. Di sisi lain, sebagian besar investor dalam survey yang dilakukan oleh McKinsey & Co dan menurut Reynolds menyatakan kesediaan mereka membayar nilai premium bagi perusahaan-perusahaan yang memperhatikan standar *Good Corporate Governance* yang tinggi, terutama perusahaan-perusahaan di Indonesia.

- D. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen yang diungkapkan oleh FCGI dan juga Nurdin. Logikanya sama seperti yang dijelaskan Hasan melalui keterkaitan antara implementasi *Good Corporate Governance* dengan proses penciptaan nilai. Begitu pula Syakhroza yang berpendapat bahwa *Good Corporate Governance* terutama dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan

tujuan akhir tercapainya *stakeholder satisfaction* yang meliputi *task satisfaction* dan *employee satisfaction*, seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Hubungan GCG dan *Good end Results*

2.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

FCGI menjabarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut¹⁰:

- a) *Disclosure and Transparency*. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practice* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan Informasi Teknologi (IT) dan *Management*

¹⁰ Ibid. hal.90-91

Information Sistem (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh manajemen yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan yang kosong serta terbuka

- b) *Accountability*. Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan *balance of power* antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi audit internal sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan *best practices*. Transformasi menjadi *risk-base* audit; menjaga manajemen kontrak yang bertanggungjawab dan menangani pertentangan; penegakan hukum; menggunakan eksternal auditor yang memenuhi syarat.
- c) *Responsibility*. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan,

menjadi profesional dan menjunjung etika, memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

- d) *Fairness*. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham. Terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan pemegang saham oleh orang dalam (*insider trading*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perilaku orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, dan komite, termasuk sistem remunerasi; menyajikan informasi secara wajar/pengungkapan penuh material apapun; mengungkapkan *equal job opportunity*.

2.3 Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi.¹¹

¹¹ Arifin. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta; Persada, 2007) Hal. 34

Mekanisme *corporate governance* adalah upaya penegakan praktik *corporate governance* dalam perusahaan yang diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan dan juga diharapkan mampu untuk mengontrol biaya keagenan.¹²

Mekanisme *corporate governance* menurut Boediono adalah suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah keagenan.¹³

2.4 Indikator Mekanisme *Corporate Governance*

a. Komisaris Independen

Istilah independen pada komisaris independen maupun direksi independen bukan menunjukkan bahwa komisaris atau direksi lainnya tidak independen. Istilah tersebut menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor. Adanya komisaris independen tidak terlepas dari keberadaan komisaris (pada umumnya). Komisaris merupakan organ yang mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Di Indonesia dewan komisaris merupakan organ yang bersifat pasif dan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif terhadap direksi. Atau sebaliknya, peran komisaris terlalu kuat dalam perusahaan, sehingga sering kali melakukan intervensi terhadap

¹² Sugiarto. Struktur modal, struktur kepemilikan dalam investasi usaha. (Jakarta, bentang pustaka. 2007) hal.50

¹³ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011) hal.77

kebijakan direksi. Sikap pasif ini atau sikap yang mengintervensi setiap kebijakan yang diambil direksi tersebut pada akhirnya akan dapat merugikan kepentingan pemegang saham (minoritas) serta *stakeholder* lainnya. Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.¹⁴

b. Dewan Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perseroan. Direksi dalam

¹⁴ Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana, Penerapan *Good corporate governance*: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006) , h. 92

memimpin dan mengurus Perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan secara amanah dan transparan. Untuk itu direksi mengembangkan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko secara terstruktur dan komprehensif. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.¹⁵

c. Komite Audit

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG. Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Komite audit ini memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan. Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan

¹⁵ Ibid. Hal. 93

komisaris dengan internal auditor. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris.¹⁶

2.5 Implementasi Prinsip-Prinsip GCG Dalam Bidang Perbankan

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Resiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat di bidang perbankan. Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan GCG menjadi suatu keniscayaan mengingat sektor perbankan mengelola dana publik (nasabah).¹⁷

Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip GCG antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 desember 2000 tentang Bank Umum, yang mana di dalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris bank Umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank.

Tujuan utama dari peraturan ini adalah sebagai upaya perwujudan *corporate governance* dengan mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh direksi dan/atau komisaris, maupun pemegang saham.

¹⁶ Ibid. Hal. 95

¹⁷ Op. cit. hal. 116

Peraturan tersebut memiliki korelasi yang kuat, mengingat organ perusahaan yang mendapat perhatian paling besar untuk diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya adalah dewan direksi dan komisaris. Apalagi dalam kenyataannya, peranan direksi dan komisaris rentan untuk disalahgunakan seandainya tidak ada mekanisme *check and balances* yang baik antara seluruh organ perusahaan.

3. Struktur Kepemilikan

Menurut UU No. 19, Tahun 2003 Tentang BUMN, privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Adanya privatisasi membuat struktur kepemilikan menjadi berubah, dimana kepemilikan pemerintah menjadi berkurang dengan penjualan saham kepada pihak lain. Selanjutnya peran swasta makin meningkat sedangkan peran pemerintah makin berkurang.

Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam sebuah perusahaan. Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan, dan

individual domestik. Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya.¹⁸

Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. *Agency problem* dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Jensen dan Meckling menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional merupakan dua mekanisme *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan.

Proporsi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan ada kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Sedangkan pemegang saham institusional memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritas atau diatas 5%. Pemegang saham institusional besar diasumsikan memiliki orientasi investasi jangka panjang. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Wahyu dan Pawestri menguji pengaruh kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan keputusan keuangan sebagai variabel *intervening*, menemukan bahwa struktur kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham, sehingga akan

¹⁸ Sugiarto. Struktur modal, struktur kepemilikan dalam investasi usaha. (Jakarta, bentang pustaka. 2007) hal.43

memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Tetapi penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap keputusan keuangan maupun nilai perusahaan.¹⁹

3.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Menurut Mehran dalam Aida kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen. Menurut Itturiaga dan Sanz struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan (*agency approach*) dan pendekatan ketidakseimbangan (*asymmetric information approach*). Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai sebuah instrumen atau alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap perusahaan.

Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal. Gunarsih menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas

¹⁹ Arifin. Peran Akuntan Dalam Menegakkan GCG. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. (desember, 2010) Hal. 3-4

sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah keagenan. Manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari para pemegang saham, Ros menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai bagian konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.²⁰

3.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi badan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Bathala juga menemukan bahwa kepemilikan institusional menggantikan kepemilikan manajerial dalam mengontrol *agency cost*. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar

²⁰ Tri, Gunarsih. Struktur *Corporate Governance* dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol.12 No.2, Mei 2008 Hal. 5-7

kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat.²¹

Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat dan dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Hal tersebut disebabkan jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena dapat menimbulkan masalah pertahanan yang berarti jika kepemilikan manajerial tinggi mereka memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini disebabkan tingginya hak *voting* yang dimiliki manajer. Adanya pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajer maka akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Masalah *corporate governance* merupakan masalah yang timbul sebagai akibat pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut antara lain karena karakteristik kepemilikan dalam perusahaan, seperti:

²¹Sugiarto. Struktur modal, struktur kepemilikan dalam investasi usaha. (Jakarta, bentang pustaka. 2007) hal.15-16

1. Kepemilikan Menyebar.

Ditemukan bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen daripada perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi.

2. Kepemilikan Terkonsentrasi.

Dalam tipe kepemilikan seperti ini timbul dua kelompok pemegang saham, yaitu *controlling interest* (kepemilikan saham pengendalian) dan *minority interest* (kepemilikan saham minoritas).

3. Kepemilikan dalam BUMN

Kepemilikan dalam BUMN mempunyai artian khusus bahwa pemiliknya tidak dapat mengontrol secara langsung perusahaannya. Pemilik hanya diwakili oleh pejabat yang ditunjuk. Kesepakatan dapat terjadi antara wakil pemilik dengan manajemen, wakil pemilik dan pihak manajemen dengan kreditur.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Ridho Alief Noviawan dan Aditya Septiani (*Diponegoro Journal of Accounting*) menguji Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian ini menggunakan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit sebagai proksi mekanisme *corporate governance*. Sedangkan struktur kepemilikan menggunakan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, dan kinerja keuangan yang diukur oleh ROA (*return on asset*) sebagai proksi

kinerja keuangannya. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2011 dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti.

Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat dikurangi dengan pengawasan yang tepat. Adanya dewan komisaris yang independen akan meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dalam perusahaan.

Dalam suatu organisasi, terdapat konflik antar anggota yang mungkin timbul dan dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan dan juga arus informasi kepada pihak eksternal. Pfeffer dan Salancik menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah besar akan semakin tinggi. Oleh karena itu, ukuran dewan direksi berperan dalam kinerja perusahaan dan dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi di perusahaan.

Sam'ani menyatakan bahwa komite audit memiliki peran penting dan strategis dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan seperti menjaga sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta penerapan GCG. Dengan berjalannya fungsi komite audit yang efektif, maka fungsi pengawasan terhadap perusahaan akan lebih baik dan dapat mencegah konflik keagenan, juga dapat meningkatkan kinerja keuangan.

2. Peran Praktek GCG Memediasi Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan. Penelitian ini dilakukan oleh Fadjar OP Siahaan dalam Jurnal Aplikasi Manajemen Universitas Kebangsaan Bandung. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan persentase saham yang dimiliki oleh publik sebagai proksi dari Struktur Kepemilikan, dan GCG diproksikan melalui *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Sedangkan untuk kinerja perusahaan diproksikan melalui ROA dan ROS sebagai proksinya. Objek penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI pada periode 2009-2011 dan beberapa kriteria lain yang diinginkan oleh peneliti.

Struktur kepemilikan saham pada perusahaan memiliki proporsi yang beragam. Kepemilikan pemerintah justru mengakibatkan menurunnya kinerja perusahaan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepemilikan publik secara langsung menurunkan kinerja perusahaan baik dalam ukuran ROA maupun ukuran ROS serta GCG yang berarti peran pemegang saham publik tidak mampu mempengaruhi kinerja dan mendukung GCG. Sementara itu, melalui implementasi GCG tidak mempengaruhi peningkatan kinerja dalam ukuran ROA, namun mampu meningkatkan kinerja dalam ukuran ROS, yang berarti kinerja hasil operasi semakin meningkat seiring peningkatan implementasi GCG. GCG tidak mampu memediasi struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan dalam ukuran ROS.

3. Muslim Al Kautsar dan Achmad Fadjar melakukan penelitian Pengaruh Struktur Kepemilikan dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan BUMN. Penelitian ini terdapat di dalam Jurnal Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis yang Profesional. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan proksi kepemilikan publik pada perusahaan BUMN dalam proksi struktur kepemilikan, serta menggunakan prinsip-prinsip GCG yang meliputi *transparency*, *accountability*, *fairness*, *independency*, dan *responsibility*. Selanjutnya kinerja keuangan BUMN diukur dengan menggunakan rasio ROE (*return on asset*) dan NPM (*net profit margin*). Populasi dalam penelitian ini adalah BUMN yang terletak di Jawa Barat yang telah melakukan privatisasi sampai tahun 2009. Hasil dari penelitian ini adalah: struktur kepemilikan dan GCG secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja BUMN. Struktur kepemilikan dan GCG masing-masing secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN *go public* yang berkantor pusat di Jawa Barat.

C. Kerangka Teoritik

Perusahaan yang telah mampu menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik akan mampu memiliki kinerja yang baik dengan tingkat sensitivitas yang tinggi dalam segala aktivitas bisnis yang dijalankan dalam dunia usaha.²²

Penerapan *Good Corporate Governance* telah menjadi kebutuhan yang nyata bagi peningkatan kinerja BUMN. Berdasarkan analisis yang cukup komprehensif

²²Muh. Arief Effendi, *The Power Of Good corporate Governance*, (Jakarta, Salemba Empat, 2009) hal.99

dapat dikatakan bahwa peraturan-peraturan yang terkait dengan kebijakan penerapan *Good Corporate Governance* dalam BUMN telah cukup lengkap dan memadai.²³

Selain itu, menurut Wahyu Kurniawan *corporate governance* merupakan suatu konsep baru yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam meningkatkan kinerja perusahaan.²⁴

Komposisi kepemilikan saham memiliki dampak yang penting pada sistem kendali perusahaan. Banyaknya jumlah non eksekutif pada dewan direksi dan fungsi terpisah dari CEO dan pimpinan perusahaan dapat meningkatkan kinerja perputaran ekonomi perusahaan.²⁵

Komposisi kepemilikan saham dalam perbankan, harus juga mempertimbangkan keadilan dan persaudaraan, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, juga unsur-unsur yang dapat meningkatkan kinerja bank yang bersangkutan.²⁶

Tingkat kepemilikan saham bisa terkonsentrasi ataupun menyebar antara banyak pemilik. Tingkat konsentrasi dan komposisi kepemilikan menentukan distribusi kekuasaan perusahaan antara manajer dan pemegang saham, yang pada dirinya akan

²³ Indra Surya, dan Ivan Yustiawananda., Penerapan Good Corporate Governance (LKPMK FHUI, 2008) hal.116

²⁴Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance* Dalam Aspek Hukum Perusahaan (Jakarta, Grafiti, 2012) hal.1

²⁵Ibid. hal.26

²⁶ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011) hal.9

mempengaruhi sifat pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kinerja perusahaan.²⁷

Melalui penerapan GCG serta struktur kepemilikan yang baik, diharapkan beberapa poin berikut: 1. Perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta mampu meningkatkan pelayanannya kepada *stakeholders*, 2. Perusahaan lebih mudah memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*, 3. Mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan, 4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka berpikir diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: terdapat pengaruh mekanisme *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan.

²⁷ M. Umer Chapra Habib Ahmed. Corporate Governance lembaga Keuangan Syariah (Bumi Aksara, 2008) hal.64

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data atau fakta yang tepat (sahih) dan dapat dipercaya tentang seberapa jauh pengaruh mekanisme *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

B. Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini adalah dari bulan mei sampai dengan bulan juni 2015.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank pada periode 2011-2013 yang dipublikasikan secara umum dan terdaftar dalam Bank Indonesia. Dalam hal ini peneliti akan menguji sampel yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti.

D. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan. Pemilihan populasi ini merupakan perusahaan perbankan publik yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah perbankan yang memiliki kriteria tertentu yang sesuai dengan keinginan peneliti. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*¹ agar peneliti mampu mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhannya.

Sampel yang digunakan harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan yang sudah *go public* pada periode 2011-2013 dan terdaftar di BEI serta sudah mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya. Serta laporan ICMD periode 2011-2013.
2. Lengkapnya data yang tersedia, dalam hal ini data mengenai *corporate governance* dan data yang diperlukan dalam mengukur kinerja keuangan perbankan.
3. Perusahaan tidak boleh mengalami kerugian di periode yang terkait.

1	Perbankan yang sudah <i>go public</i> periode 2011-2013	31
2	Perbankan yang mengalami kerugian di periode 2011-2013	(4)
3	Total perbankan yang memenuhi kriteria	27

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan perbankan selama periode 2011-2013 yang bisa dilihat dalam laporan

¹Sugiyono *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 85

publikasi Bank Indonesia serta terdapat di dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. Atau pun dari situs perusahaan masing-masing sampel.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data dokumentasi, yakni data sekunder yang berupa *annual report* bank yang sudah *go public* dan laporan ICMD yang sudah dipublikasikan.

1.1 Definisi Konseptual (X)

Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.² *Corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

1.2 Definisi Operasional (X)

Untuk mengukur *corporate governance* yang terdiri dari beberapa variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini, tiap variabel menunjukkan cara pengukuran yang berbeda-beda satu sama lainnya. Berikut adalah pengertian dari masing-masing variabel:

² Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan *Good corporate governance*: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006)h. 6

1. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*). Dihitung berdasarkan persentase dari jumlah komisaris independen, dibagi dengan total anggota dewan komisaris. Jumlah komisaris independen diperoleh dari laporan tahunan masing-masing perusahaan dan juga dari pengumuman yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia.

2. Dewan direksi

Dewan direksi adalah anggota dewan yang bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan dan menjalankan manajemen perusahaan. Untuk penelitian ini menggunakan variabel dengan menghitung jumlah dewan direktur dalam perusahaan diukur dengan jumlah anggota dewan direksi yang ada di dalam perusahaan.

3. Komite audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan dalam bertanggung jawab membantu auditor dalam mempertahankan independensi dari manajemen (*forum for corporate governance in Indonesia*). Untuk menentukan perusahaan mempunyai

komite audit atau tidak di laporan keuangan tahunan masing-masing perusahaan dan pengumuman yang dikeluarkan BEI. Hal ini ditentukan berdasarkan jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan.

4. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan persentase kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun.

2.1 Definisi Konseptual (Y)

Kinerja atau *performance* merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya. berdasarkan tujuan yang di tetapkan oleh perusahaan tersebut pada awal periode dan hasilnya akan di lihat pada akhir periode yang bersangkutan.³

³ Ruky, Ahmad S. *Sistem manajemen kinerja*, (Jakarta; Gramedia pustaka utama, 2009) hal.4

2.2 Definisi Operasional (Y)

Kinerja keuangan sebagai variabel terikat, peneliti dalam penelitian ini menggunakan kinerja keuangan dengan diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA) dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aktiva.

$$ROA = \frac{EBIT}{Assets}$$

Dimana : ROA = Return On Asset

EBIT = Earning before tax

Assets = Total aktiva

F. Teknik Analisis Data

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh dari proporsi komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan persentase kepemilikan institusional sebagai variabel independen dalam penelitian ini dengan variabel dependennya yaitu kinerja keuangan perusahaan. Dengan menggunakan uji asumsi klasik, yaitu: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Penelitian ini menggunakan persamaan regresi linear berganda.

3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak serta menguji normalitas data yang digunakan pada grafik histogram yang

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Bila asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Dalam mengetahui normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik dengan menganalisis grafik normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan potongan data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.⁴

Analisis statistik dalam uji normalitas ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* (KS). Jika hasilnya menunjukkan nilai signifikan >0.05 maka data residual berdistribusi normal. Apabila nilai signifikan <0.05 maka data residual berdistribusi tidak normal.

3.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam regresi, dapat dilihat dari *tolerance value* dan nilai *Variance Influence Faktor* (VIF).⁵

⁴ Ghozali, Imam., Analisis Multivariate SPSS, (Semarang; BP Undip, 2005) hal.110

⁵ Ibid. hal. 112

Model regresi yang bebas multikolinearitas yang mempunyai nilai *tolerance value* di atas 0,1 atau di bawah 10. Apabila *tolerance value* di bawah 0,1 atau di atas 10 maka hal itu menunjukkan tidak adanya multikolinearitas.

3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedasititas dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot.⁶

Dasar pengambilan grafik scatterplot adalah sebagai berikut:

1. Jika terdapat pola tertentu pada grafik scatterplot seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (misalnya bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Apabila tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4 Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk menguji dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan penggunaan periode satu dengan kesalahan

⁶J. Supranto. Statistik Teori dan Aplikasi. (Jakarta; Erlangga, 2012) hal. 97

pada periode t^{-1} (tahun sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ada tidaknya autokorelasi dapat diketahui dari uji *Durbin-Watson* (DW), dari hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai *Durbin-Watson* (DW).⁷

3.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dimana model penghitungannya sebagai berikut:

$$Y_a = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4$$

Keterangan:

Y_a = kinerja keuangan (ROA)

x_1 = proporsi komisaris independen

x_2 = dewan direksi

x_3 = komite audit

x_4 = struktur kepemilikan

a = konstanta b = koefisien regresi

⁷ Ibid. hal 99

3.6 Uji F

Uji F dilakukan dengan menguji secara serempak (simultan) apakah semua variabel yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel.

1. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Bila nilai probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima, jika nilai probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak.⁸

3.7 Uji t

Uji t digunakan dalam menguji hipotesis serta menguji signifikansi pengaruh dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu uji t ini digunakan untuk menguji hipotesis H_{a1} , H_{a2} , H_{a3} , H_{a4} . Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁸ Op. Cit. hal. 120

Ha ditolak apabila $\text{Sig } t > \text{tingkat signifikansi } \alpha (0,05)$

Ha diterima apabila $\text{Sig } t < \text{tingkat signifikansi } \alpha (0,05)$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis menganalisis dari data yang telah dikumpulkan. Data tersebut berupa laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sektor perbankan periode 2011-2013. Hasil pengolahan data berupa informasi untuk mengetahui apakah Mekanisme *Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

Sesuai dengan permasalahan dan perusahaan model yang telah dikemukakan sebelumnya, serta untuk kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif dan analisa statistik. Analisis statistik merupakan analisis yang mengacu pada perhitungan data penelitian yang berupa angka-angka yang dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sedangkan statistik deskriptif merupakan analisa yang menjelaskan gejala-gejala yang terjadi pada seluruh variabel penelitian untuk mendukung hasil analisis statistik. Interpretasi dalam menjelaskan statistik deskriptif dibuat dengan menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dengan bertujuan untuk memudahkan pembacaan hasil statistik deskriptif.

B. Statistik Deskriptif

Berikut ini akan dijelaskan statistik deskriptif yaitu menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian. Variabel terikat yakni kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) dan variabel bebas yaitu Mekanisme *Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan.

Berikut adalah distribusi frekuensi dan grafik histogram dari masing-masing variabel:

1. Komisaris independen.

Tabel 4.1

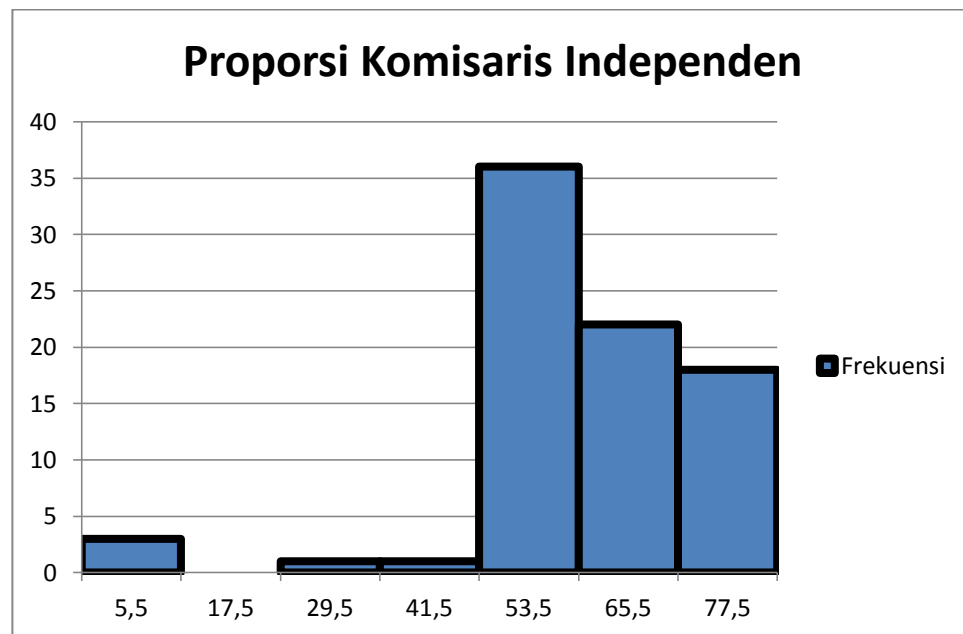
Distribusi Frekuensi Komisaris Independen

Kelas interval	Batas bawah	Batas atas	Nilai tengah	Frekuensi
0 – 11	-0,5	11,5	5,5	3
12 – 23	11,5	23,5	17,5	0
24 – 35	23,5	35,5	29,5	1
36 – 47	35,5	47,5	41,5	1
48 – 59	47,5	59,5	53,5	36
60 – 71	59,5	71,5	65,5	22
72 – 83	71,5	83,5	77,5	18

Data diolah dengan *microsoft word* 2007

Berikut ini disajikan grafik histogram dari distribusi frekuensi untuk mempermudah penafsiran tabel distribusi frekuensi di atas:

Grafik 4.1



Data diolah dengan menggunakan *microsoft excel 2007*

Berdasarkan grafik histogram di atas, dapat dilihat bahwa frekuensi komisaris independen tertinggi terletak pada interval 48-59 yakni sebesar 36. Hasil terbanyak jumlah komisaris independen di perbankan terletak pada rentang skor 47,5 sampai 59,5. Dengan rata-rata sebesar 41, maka terdapat 4 perbankan dalam tiga periode yang berada di bawah rata-rata dan 76 perbankan dalam tiga periode yang mengalami keadaan di atas rata-rata.

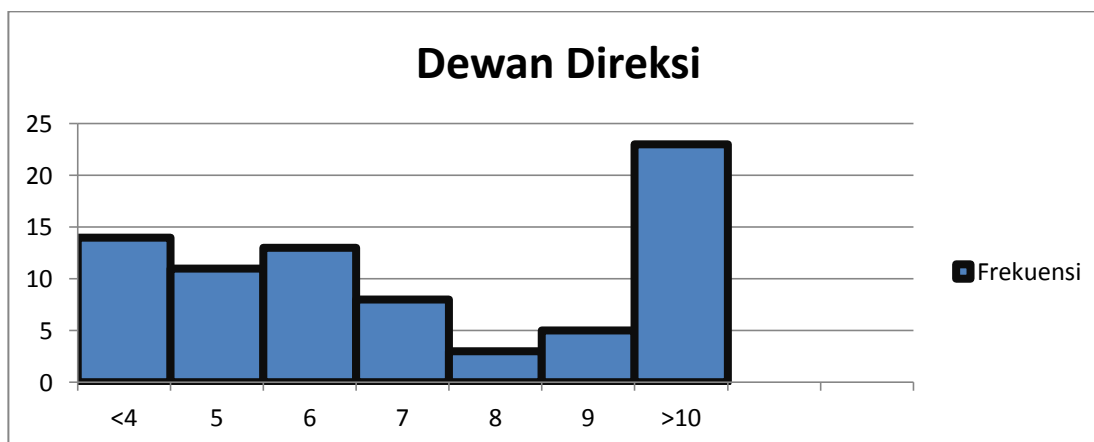
2. Dewan direksi

Tabel 4.2**Distribusi Frekuensi Dewan Direksi**

Kelas interval	Batas bawah	Batas atas	Nilai tengah	Frekuensi
<4	3,5	4,5	4	14
5	4,5	5,5	5	11
6	5,5	6,5	6	13
7	6,5	7,5	7	8
8	7,5	8,5	8	3
9	8,5	9,5	9	5
>10	9,5	10,5	10	23

Data diolah dengan *microsoft word 2007*

Berikut ini disajikan grafik histogram dari distribusi frekuensi untuk mempermudah penafsiran tabel distribusi frekuensi di atas:

Grafik 4.2

Data diolah dengan menggunakan *microsoft excel 2007*

Berdasarkan grafik histogram di atas, dapat dilihat bahwa frekuensi dewan direksi tertinggi terletak pada interval >10 yakni sebesar 23. Hasil terbanyak jumlah dewan direksi di perbankan terletak pada rentang skor 9,5-10,5. Dengan rata-rata sebesar 7 orang, maka terdapat 58 perbankan dalam tiga periode yang berada di bawah rata-rata.

3. Komite audit.

Tabel 4.3

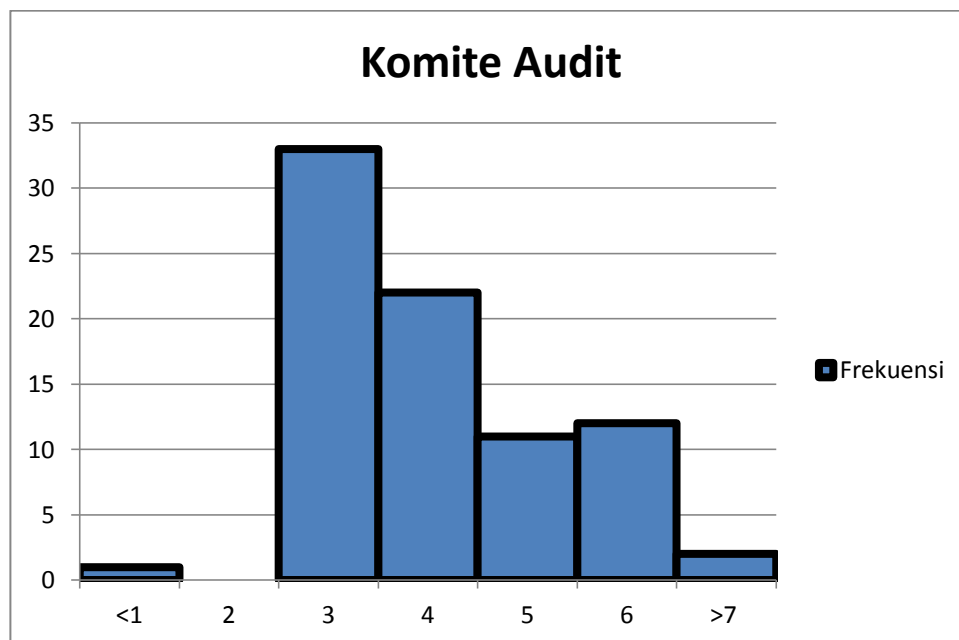
Distribusi Frekuensi Komite Audit

Kelas interval	Batas bawah	Batas atas	Nilai tengah	Frekuensi
<1	0,5	1,5	1	1
2	1,5	2,5	2	0
3	2,5	3,5	3	33
4	3,5	4,5	4	22
5	4,5	5,5	5	11
6	5,5	6,5	6	12
>7	6,5	7,5	7	2

Data diolah dengan *microsoft word 2007*

Berikut ini disajikan grafik histogram dari distribusi frekuensi untuk mempermudah penafsiran tabel distribusi frekuensi di atas:

Grafik 4.3



Data diolah dengan menggunakan *microsoft excel 2007*

Berdasarkan grafik histogram di atas, dapat dilihat bahwa frekuensi komite audit tertinggi terletak pada jumlah 3 yakni sebesar 33. Hasil terbanyak jumlah komite audit di perbankan terletak pada kelas 2,5 – 3,5. Dengan rata-rata sebesar 4 orang, maka terdapat 34 perbankan dalam tiga periode yang berada di bawah rata-rata. Serta 25 perbankan yang jumlahnya di atas rata-rata selama tiga periode.

4. Kepemilikan institusional.

Tabel 4.4

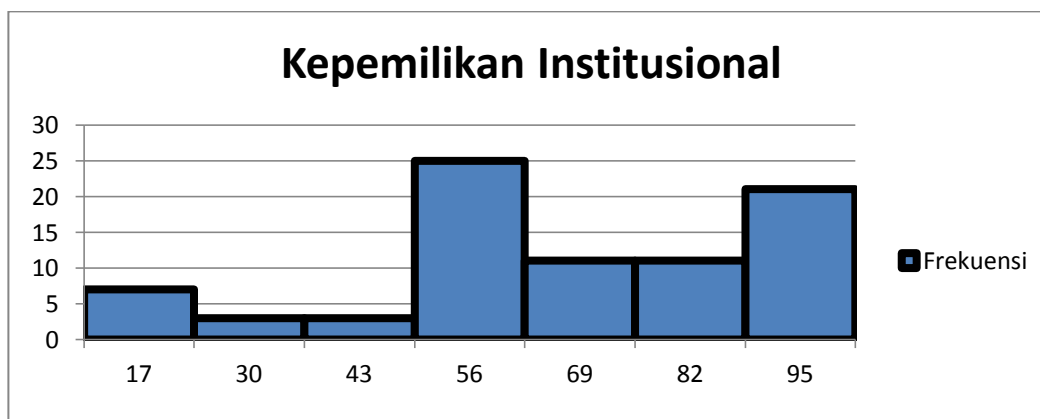
Distribusi Frekuensi Kepemilikan Institusional

Kelas interval	Batas bawah	Batas atas	Nilai tengah	Frekuensi
11 – 23	10,5	23,5	17	7
24 – 36	23,5	36,5	30	3
37 – 49	36,5	49,5	43	3
50 – 62	49,5	62,5	56	25
63 - 75	62,5	75,5	69	11
76 – 88	75,5	88,5	82	11
89 - 101	88,5	101,5	95	21

Data diolah dengan *microsoft word 2007*

Berikut ini disajikan grafik histogram dari distribusi frekuensi untuk mempermudah penafsiran tabel distribusi frekuensi di atas:

Grafik 4.4



Data diolah dengan menggunakan *microsoft excel 2007*

Berdasarkan grafik histogram di atas, dapat dilihat bahwa frekuensi kepemilikan institusional tertinggi terletak pada interval 50 - 62 jumlahnya yakni sebesar 25. Hasil terbanyak jumlah kepemilikan institusional di perbankan terletak pada rentang interval 63 - 75. Dengan rata-rata sebesar 67 orang, maka terdapat 38 perbankan dalam tiga periode yang berada di bawah rata-rata. Serta 43 perbankan yang jumlahnya di atas rata-rata selama tiga periode.

5. *Return on Asset (ROA).*

Tabel 4.5

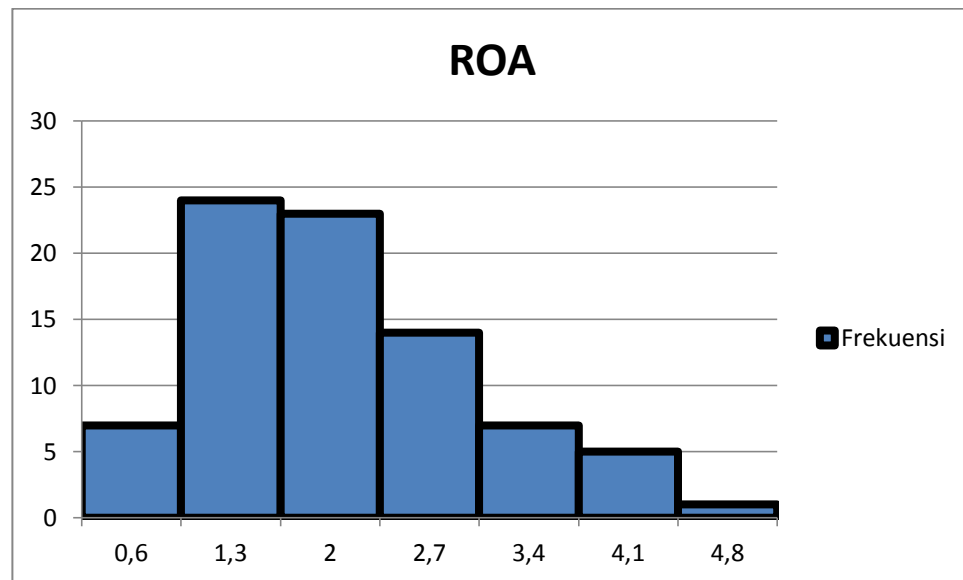
Distribusi Frekuensi ROA

Kelas interval	Batas bawah	Batas atas	Nilai tengah	Frekuensi
0,3 – 0,9	0,25	0,95	0,6	7
1,0 – 1,6	0,95	1,65	1,3	24
1,7 – 2,3	1,65	2,35	2	23
2,4 – 3,0	2,35	3,05	2,7	14
3,1 – 3,7	3,05	3,75	3,4	7
3,8 – 4,4	3,75	4,45	4,1	5
4,5 – 5,1	4,45	5,15	4,8	1

Data diolah dengan menggunakan *microsoft word 2007*

Berikut ini disajikan grafik histogram dari distribusi frekuensi untuk mempermudah penafsiran tabel distribusi frekuensi di atas:

Grafik 4.5



Data diolah dengan menggunakan *microsoft excel 2007*

Berdasarkan grafik histogram di atas, dapat dilihat bahwa frekuensi ROA tertinggi terletak pada interval 1 – 1,6 jumlahnya yakni sebesar 24. Hasil terbanyak ROA di perbankan terletak pada rentang kelas 1-1,6. Dengan rata-rata sebesar 2, maka terdapat 34 perbankan dalam tiga periode yang berada di bawah rata-rata. Serta 27 perbankan yang jumlahnya di atas rata-rata selama tiga periode.

Deskriptif data penelitian ini merupakan deskriptif dari seluruh observasi penelitian yang telah dilakukan pemotongan data sehingga diperoleh data observasi sebanyak 81 sampel perusahaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	81	.00	.05	.0209	.00953
KomisarisIndependen	81	.00	.80	.5481	.14089
DewanDireksi	81	3.00	12.00	7.3951	2.71882
Komite Audit	81	.00	8.00	4.0741	1.32077
KepemilikanInstitusional	81	.11	.99	.6735	.23483
Valid N (listwise)	81				

Sumber data: Hasil Olahan SPSS 17

Deskriptif terhadap *Corporate Governance* yang diukur dengan 3 variabel yaitu proporsi komisaris independen dengan rata-rata sebesar 0.5481 atau artinya jumlah komisaris independen yang berada pada dewan komisaris rata-rata sebesar 54.8% dan hasil ini sudah sesuai dengan peraturan dalam surat direksi nomor kep-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham dengan ketentuan jumlah komisaris sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Pengukuran kedua dalam *corporate governance* yakni dewan direksi dengan rata-rata 7.3951 yang berarti bahwa perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI

umumnya rata-rata setiap 7 orang mempunyai saham dari pihak manajemen. Pfeffer dan Salancik menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah besar akan semakin tinggi. Oleh karena itu, ukuran dewan direksi berperan dalam kinerja perusahaan dan dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi di perusahaan.¹

Hasil deskriptif komite audit menunjukkan rata-rata sebesar 4.0741 yang berarti perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI memiliki komite audit sekitar 4 orang di masing-masing perusahaan. Sam'ani menyatakan bahwa komite audit memiliki peran penting dan strategis dalam berjalannya fungsi komite audit yang efektif, maka fungsi pengawasan terhadap perusahaan akan lebih baik dan dapat mencegah konflik keagenan, juga dapat meningkatkan kinerja keuangan.²

Hasil deskriptif variabel struktur kepemilikan memiliki rata-rata sebesar 0.6735 yang berarti hanya sebesar 67% perusahaan perbankan yang sahamnya lebih dikuasai oleh kepemilikan institusional. Besarnya jumlah kepemilikan institusional dalam penelitian ini tidak serta merta mempengaruhi kinerja keuangan secara terpisah. Besarnya persentase kepemilikan institusional di karenakan menaruh saham di dunia perbankan dianggap cukup menguntungkan, karena dunia perbankan dianggap memiliki tingkat kepercayaan yang cukup besar dari masyarakat.

¹Pfeffer dan Salancik dalam Sekaredi. *Diponegoro Journal of Accounting*. h.3

² Ibid.

C. Uji Asumsi Klasik

1.1 Uji Normalitas

Tabel 4.7

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00798841
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.673
Asymp. Sig. (2-tailed)		.755

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber Data: Hasil Olahan SPSS 17

Hasil pada kolom *one sample kolmogorov smirnov test* dapat diketahui bahwa signifikansi untuk *unstandardized residual* sebesar 0.755. Signifikansi untuk *unstandardized residual* lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data pada *unstandardized residual* berdistribusi normal.

1.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang bebas multikolinearitas yang mempunyai nilai *tolerance value* di atas 0,1 atau di bawah 10. Apabila *tolerance value* di bawah 0,1 atau di atas 10 maka hal itu menunjukkan tidak adanya multikolinearitas.

UjiMultikolinearitas:

Tabel 4.8

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	KomisarisIndependen	.936	1.068
	DewanDireksi	.678	1.475
	Komite Audit	.686	1.475
	KepemilikanInstitusional	.925	1.081

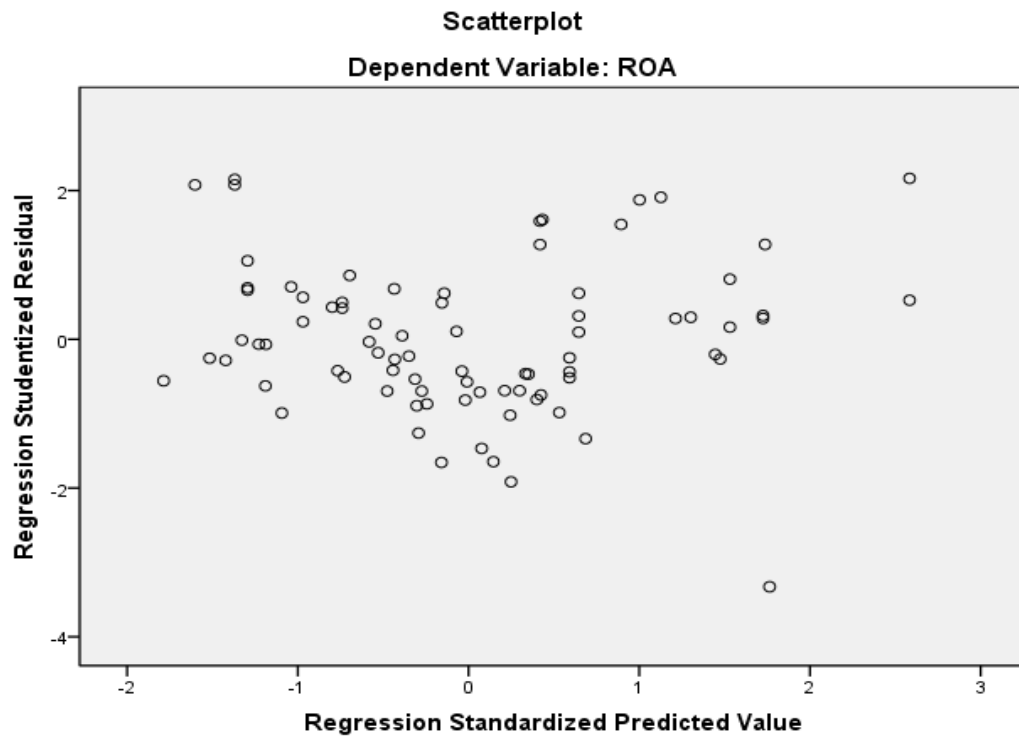
a. Dependent Variable: ROA

Sumber Data: Hasil Olahan SPSS 17

Pada tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa VIF untuk semua variabel independen berkisar di angka 1. Demikian juga untuk nilai *tolerance* berkisar di atas 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa regresi tidak mengalami gangguan multikolinearitas.

1.3 Uji Heteroskedastisitas

Grafik 4.6



Sumber Data: Hasil Olahan SPSS 17

Dari grafik 4.6 scatterplot di atas, karena tidak terdapat pola yang jelas maka grafik tersebut dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

1.4 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk melihat adanya korelasi yang runtut, misalnya data yang pertama berkorelasi dengan data yang kedua, data yang kedua berkorelasi dengan data yang ketiga dan seterusnya. Model regresi yang baik adalah

regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ada tidaknya autokorelasi dapat diketahui dari uji *Durbin-Watson* (DW), dari hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai *Durbin-Watson* (DW). Berikut ini adalah hasil uji statistik ada tidaknya autokorelasi pada penelitian ini:

Tabel 4.9

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.547 ^a	.299	.263	.00820	1.867

a. Predictors: (Constant), KepemilikanInstitusional, KomisarisIndependen, Komite Audit, DewanDireksi

b. Dependent Variable: ROA

Sumber Data: Hasil Olahan SPSS 17

Untuk mengetahui apakah data pada penelitian ini mengandung autokorelasi atau tidak dapat dilihat pada tabel 4.9 diatas yang menunjukkan bahwa nilai DW adalah 1.867. Karena nilai DW (2.257) maka berada pada daerah antara dU dan 4-dU, maka tidak ada autokorelasi.

Dengan angka sebesar 0.263 atau sebesar 26.3% maka artinya kinerja dipengaruhi oleh mekanisme *corporate governance* dan struktur kepemilikan dan sisanya yakni sebesar 73.7% adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan di dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan.

D. Analisis Regresi Linier Berganda

1.5 Uji F

Fhitung digunakan untuk menguji apakah model persamaan yang diajukan dapat diterima atau tidak. Hal tersebut dapat diketahui dengan membandingkan Fhitung tersebut dengan Ftabel. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka model persamaan yang diajukan dapat diterima. Dari tabel berikut dapat dijelaskan sebagaimana tersaji dibawah ini.

Tabel 5.0

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.002	4	.001	8.120	.000 ^a
	Residual	.005	76	.000		
	Total	.007	80			

a. Predictors: (Constant), KepemilikanInstitusional, KomisarisIndependen, Komite Audit, DewanDireksi

b. Dependent Variable: ROA

Sumber Data: Hasil Olahan SPSS 17

Hasil analisis regresi diatas dapat diketahui nilai Fhitung sebesar 8.120, sedangkan Ftabel dapat dilihat pada α 0,05 dengan derajat bebas pembilang = $(k-1) = 4-1 = 3$, derajat penyebut = $(n-k) = 81 - 4 = 77$, jadi Ftabel 0,05 (3,77) = 2,723343.

Oleh karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dapat diterima.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari nilai probabilitasnya dengan taraf 0,05 maka dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya $0,000 < 0,05$, maka model persamaan regresi dapat diterima.

Berarti dalam penelitian ini proporsi komisaris independen (x1), dewan direksi (x2), komite audit (x3), dan struktur kepemilikan (x4) berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan (Y) diterima, dalam hal ini pengukuran kinerja keuangan menggunakan ROA. Artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan struktur kepemilikan secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan.

1.5 UJI t

Uji t digunakan untuk menentukan signifikan tidaknya suatu variabel penjelasan atau variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Berikut ini adalah hasil uji t yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 5.1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.011	0.005		2.177	.033
KomisarisIndependen	-.005	0.007	-.078	-.781	.437
DewanDireksi	.001	0.000	.351	3.009	.004
Komite Audit	.002	0.001	.302	2.607	.011
KepemilikanInstitusional	-.008	0.004	-.191	-1.909	.060

a. Dependent Variable: ROA

Sumber Data: Hasil Olahan SPSS 17

Dari tabel koefisien di atas dapat dilihat dari hasil uji t sebagai berikut:

1. Komisarin Independen didapatkan $p = 0,437$ ($p > 0,05$) artinya secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA.
2. Dewan Direksi didapatkan $p = 0,004$ ($p < 0,05$) artinya secara parsial berpengaruh terhadap ROA.
3. Komisaris Audit didapatkan $p = 0,011$ ($p < 0,05$) artinya secara parsial berpengaruh terhadap ROA.
4. Kepemilikan Institusional didapatkan $p = 0,060$ ($p > 0,05$) artinya secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA.

Sedangkan T_{tabel} dapat dilihat dengan derajat bebas = $n - k = 81 - 4 = 77$ pada t 0,05 atau t 0,25 yaitu sebesar 1,99. Hal ini berarti bahwa nilai dewan direksi, komite audit, dan struktur kepemilikan lebih besar dari T_{tabel} . Dari hasil ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil uji t untuk variabel komisaris independen menunjukkan angka $-0.781 < 1.99$ dengan tingkat probabilitas sebesar 0.437 lebih besar dari 0.05 sehingga H_1 : komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ROA diterima. Hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama, pengangkatan komisaris independen mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak bertujuan untuk menegakkan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan. Jika pengangkatan komisaris independen hanya sebatas regulasi, maka proporsi dewan komisaris mungkin tidak perlu diperbanyak, tetap sesuai dengan peraturan yang ada (30%), dan mesti dilihat keefektifannya dalam jangka panjang. Kedua, masih banyaknya komisaris independen yang merangkap sebagai komisaris atau komisaris utama sehingga hal ini tidak mempengaruhi kinerja perusahaan.
2. Hasil uji t untuk dewan direksi menunjukkan $3.009 > 1.99$ dengan tingkat probabilitasnya 0.04 lebih kecil dari 0.05 sehingga H_2 : dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang dalam hal ini diwakilkan oleh ROA. Dilihat dari hubungan dewan direksi dengan ROA hal ini menunjukkan hubungan yang positif. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat

kepemilikan saham oleh dewan direksi, maka semakin tinggi besaran ROA pada laporan keuangan.

3. Hasil uji t untuk komite audit yakni sebesar $2.607 > 1.99$ dengan tingkat probabilitasnya 0.011 lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa H3: komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diwakilkan oleh ROA. Hubungan positif di antara komite audit dan ROA menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh dalam penegakkan *Good Corporate Governance*.
4. Hasil uji t untuk variabel struktur kepemilikan menunjukkan $-1.909 < 1.99$ dan memiliki tingkat probabilitas sebesar 0.060 dan lebih besar dari 0.05. hal ini menunjukkan bahwa H4: struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
5. Berdasarkan uji f dan uji t diatas dapat dibuat garis regresi yang terdiri dari variabel dependen yakni kinerja keuangan (ROA) dan variabel independen yang terdiri dari komisar independen, dewan direksi, komite audit, serta struktur kepemilikan dengan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_a = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4$$

$$Y = 0.011 + (0.005)X_1 + 0.004X_2 + 0.002X_3 + (0.008)X_4$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 0,011 artinya jika komisaris independen (X1), dewan direksi (X2), komite audit (X3), dan struktur kepemilikan (X4) nilainya adalah 0, dan ROA sebesar (Y) 0,011.
2. Koefisien regresi komisaris independen (X1) sebesar -0,005 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan komisaris independen mengalami kenaikan 1% maka ROA (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,005.
3. Koefisien regresi dewan direksi (X2) sebesar 0.004, artinya jika variabel independen lainnya tetap dan komisaris independen mengalami kenaikan 1% maka ROA (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.004.
4. Koefisien regresi komite audit (X3) sebesar 0,002, artinya jika variabel independen lainnya tetap dan komisaris independen mengalami kenaikan 1% maka ROA (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,002.
5. Koefisien regresi kepemilikan institusional (X1) sebesar -0,008, artinya jika variabel independen lainnya tetap dan komisaris independen mengalami kenaikan 1% maka ROA (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,008.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan
 - a. Komisaris Independen

Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan antara *agent* dengan *principal* dapat dikurangi dengan pengawasan yang tepat. Adanya komisaris independen akan meningkatkan kualitas fungsi pengawasan

dalam perusahaan. Semakin besar komisaris independen menunjukkan bahwa fungsi pengawasan akan semakin baik.

Berdasarkan hasil uji t, dapat dilihat bahwa komisaris independen yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan yang dalam penelitian ini diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Komisaris independen memiliki nilai uji t $-0,781$ dengan signifikansi sebesar $0,437$ yang berarti komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baysinger *et al.*, dalam Sekaradi menyatakan bahwa adanya komisaris independen tidak berpengaruh (tidak meningkatkan) terhadap kinerja, sementara Haniffa dan Cooke menyatakan bahwa semakin banyak komisaris independen dapat memberikan kekuatan kepada dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas pengungkapan. Dengan adanya pengawasan yang lebih baik akan meningkatkan kinerja keuangan.

Lemahnya komisaris independen terhadap kinerja perusahaan disebabkan beberapa sebab, diantaranya: struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia masih sangat terkonsentrasi. Jabatan komisaris diberikan kepada seseorang bukan berdasarkan pada kompetensi dan profesionalisme, tetapi sebagai penghormatan atau penghargaan, sehingga loyalitas ditujukan pada pemberi jabatan. Atau jabatan komisaris diberikan kepada pejabat atau mantan pejabat yang masih mempunyai pengaruh untuk meningkatkan posisi tawar pada perusahaan di kalangan

pemerintah. Hal ini tentunya bertujuan untuk memudahkan suatu perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan diharapkan mampu memperluas jaringan bagi perbankan yang bersangkutan.

b. Dewan Direksi

Berdasarkan hasil uji t. Dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Dengan hasil uji t sebesar 3,009 dan signifikansi sebesar 0,004 yang berarti dewan direksi memiliki pengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) yang mewakili kinerja keuangan perbankan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dalton *et al.* dalam Sam'ani yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan kinerja. Dalam hal ini dikarenakan dewan direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Direksi harus memastikan bahwa perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan undang-undang yang berlaku.

Salah satu asumsi dasar yang melandasi teori keagenan adalah teori tentang keorganisasian. Dalam suatu organisasi, terdapat konflik antar anggota yang mungkin timbul dan dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan dan juga arus informasi kepada pihak eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah besar akan semakin tinggi. Oleh karena itu, ukuran dewan direksi berperan dalam kinerja

perusahaan dan dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi di perusahaan.

Berhasil atau tidaknya kinerja sebuah perusahaan tidak terlepas dari kinerja direksi perusahaan. Akan tetapi pada praktiknya, banyak direktur yang tidak melaksanakan tugas yang di embannya dengan optimal. Bahkan beberapa diantara mereka menggunakan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Hal ini terjadi karena umumnya direktur adalah salah satu pemegang saham mayoritas ataupun berafiliasi dari pemegang saham mayoritas ataupun komisaris dimana direktur kerap memanfaatkan perusahaan yang dipimpinnya untuk memperoleh keuntungan pribadi yang bersebrangan dengan kepentingan perusahaan. Hal inilah yang mampu ditekan dalam hasil penelitian yang melibatkan bank-bank yang sudah *go public* ini.

c. Komite Audit

Hasil uji t pada komite audit menunjukkan angka 2,607 dengan signifikansi sebesar 0,011 yang berarti secara parsial komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurut Xie *et al.* ukuran komite audit dapat meningkatkan efektivitas komite audit sehingga mampu mencegah tindakan manajemen laba dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Berbeda dengan penelitian oleh Sekaredi yang menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Alasan mengapa komite audit memiliki pengaruh positif dalam penelitian ini dikarenakan komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Independensi komite audit tidak dapat dipisahkan dari moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini dikarenakan komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menghubungkan antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor.

Permasalahan keagenan yang dapat muncul dalam hubungan antara *agent* dengan *principal* adalah *moral hazard*, dimana manajer atau *agent* tidak melaksanakan tugas sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja. Salah satunya adalah kemungkinan kecurangan dalam menyusun laporan keuangan. Sam'ani menyatakan bahwa komite audit memiliki peran penting dan strategis dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan seperti halnya menjaga berjalannya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta penerapan *Good Corporate Governance*.

Dengan berjalannya fungsi komite audit yang efektif, maka fungsi pengawasan terhadap perusahaan akan lebih baik dan dapat mencegah konflik keagenan, juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Keberhasilan komite audit dalam menjalankan independensi pekerjaannya diharapkan mampu membuat suatu perbankan dapat menarik investor sebanyak-banyaknya hasil dari kinerja komite audit yang memuaskan.

2. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perbankan

a. Kepemilikan Institusional

Merujuk hasil uji t, terlihat bahwa struktur kepemilikan (dalam hal ini pengukuran dilakukan dengan menggunakan variabel kepemilikan institusional) memiliki nilai uji t sebesar -1.909 dengan nilai signifikansi sebesar 0,060 yang artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja ROA.

Struktur kepemilikan perusahaan dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi mekanisme *corporate governance* suatu perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal menunjukkan bahwa kepemilikan institusional belum efektif untuk mengontrol manajemen dan meningkatkan kinerja, sedangkan penelitian yang dilakukan Porter dalam Sekaredi mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Lemahnya kepemilikan institusional bisa terjadi karena kurangnya kontrol investor institusional dalam mengawasi kinerja manajemen selaku pengelola perusahaan.

BAB V

Kesimpulan, Implikasi Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini mekanisme *corporate governance* dan struktur kepemilikan secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan *corporate governance* dan struktur kepemilikan mampu meningkatkan kinerja keuangan dengan cukup baik.
2. Mekanisme *corporate governance* dan struktur kepemilikan masing-masing secara parsial ada yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan dan ada yang tidak berpengaruh positif.
 - a. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengangkatan komisaris independen hanya untuk pemenuhan regulasi *corporate governance* saja, tapi tidak untuk menegakkan *good corporate governance* di dalam perusahaan.

- b. Dewan direksi dan komite audit, berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Hal ini dikarenakan variabel yang bersangkutan tersebut memiliki penegakan yang positif dalam pelaksanaan *good corporate governance*.
- c. Struktur kepemilikan tidak berpengaruh dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak institusional dalam memperhatikan kinerja perbankan yang bersangkutan.

B. Implikasi

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan dalam menguji mekanisme *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perbankan. Maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang ekonomi perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka implikasinya sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian mengenai mekanisme *corporate governance* dan struktur kepemilikan ternyata memiliki hubungan yang signifikan dalam penelitian ini secara simultan. Variabel-variabel tersebut mampu mempengaruhi kinerja keuangan secara umum sebesar 26.3% .
- b. Meskipun secara umum variabel mekanisme *Corporate Governance* dan struktur kepemilikan mampu mempengaruhi kinerja perbankan, namun masih ada variabel-variabel lain yang juga mampu mempengaruhi kinerja

perbankan dan variabel-variabel tersebut tidak diangkat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

C. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan peneliti dari hasil penelitian ini.

1. Salah satu faktor untuk meningkatkan kinerja keuangan perbankan yaitu harus melaksanakan penerapan *good corporate governance* sebaik mungkin. Dengan demikian bagi perbankan yang kinerja keuangannya masih lemah, diharapkan mampu melaksanakan *good corporate governance* seoptimal mungkin.
2. Variabel struktur kepemilikan dalam penelitian ini diproksikan dengan kepemilikan publik terkonsentrasi dan menyebar dan diatas 50%. Untuk penelitian lebih lanjut, variabel struktur kepemilikan dapat dikembangkan dengan mengelompokkan struktur kepemilikan dalam beberapa kategori yaitu kepemilikan asing, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen.
3. BAPEPAM sebagai pengawas perusahaan di Indonesia harus lebih mampu meningkatkan kinerja dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang sudah *go public*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar, Muslim dan Achmad Fadjar. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan BUMN. Jurnal Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional, 2012
- Alief Noviawan, Ridho dan Aditya Septiani. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan. Diponegoro Journal of Accounting, 2012
- Arafat, Wilson. Behind a Powerful Image. Yogyakarta: Andi, 2009
- Arief Effendi, Muhammad. The Power Of Good corporate Governance. Jakarta; Salemba Empat, 2009
- Arifin. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta; Persada, 2007
- Arifin. Peran Akuntan Dalam Menegakkan GCG. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. (desember, 2010)
- Bastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga, 2005
- Ghozali, Imam. Analisis Multivariate SPSS. Semarang: BP Undip, 2005
- Gunarsih, Tri. Struktur *Corporate Governance* dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol.12 No.2, Mei 2008
- Hanafi, Mahmud M dan Abdul Halim. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: UPP YPKN, 2003
- <http://web.bisnis.com/kinerja-investasi-tahun-politik-tidak-pengaruhi-investasi> (diakses pada mei 2014)
- <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/01/16/0725250/Ekonomi.Indonesia.2012.di.Tengah.Ketidakpastian.Global> (diakses pada mei 2014)
- <http://www.businessnews.co.id/ekonomi-bisnis/menimbang-kinerja-perbankan-indonesia.php> (diakses pada 24 juli 2014)
- <http://www.infobanknews.com/2011/05/hukum-yang-menikam-perbankan/> (diakses pada april 2014)
- <http://www.neraca.co.id/harian/article/23350/Ketidakpastian.Bayangi.Perekonomian.Indonesia.2013> (diakses pada april 2013)

- Jumingan. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Kurniawan, Wahyu. *Corporate Governance: Dalam Aspek Hukum Perusahaan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- OP Siahaan, Fadjar. Peran Praktek GCG Memediasi Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Aplikasi Manajemen Universitas Kebangsaan Bandung, 2012
- Pawestri dan Wahyudi. Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. Simposium Nasional Akuntansi 9, 2006
- Ruky, Ahmad S. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Supranto, J. Statistik Teori dan Aplikasi. Jakarta; Erlangga, 2012
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Sutojo, Siswanto dan Alridge. Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat. Jakarta: PT. Damar Mulia Rahayu, 2005
- Sutedi, Adrian. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012
- Sugiarto. Struktur Modal, Struktur Kepemilikan dan Investasi Usaha. Jakarta: Bentang Pustaka, 2007
- Umer Chapra Habib Ahmed. M. Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Bumi Aksara
- Zarkasyi, Wahyudin. Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung: Alfabeta, 2008

1. Daftar Kode Bank

NO	NAMA BANK	KODE
1	PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK	AGRO
2	PT BHAKTI CAPITAL INDONESIA TBK	BACA
3	PT BANK OCBC NISP TBK	NISP
4	PT BANK MEGA TBK	MEGA
5	PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK	INPC
6	PT BANK VICTORIA INTERNASIONAL TBK	BVIC
7	PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional TBK	BTPN
8	PT BANK INDIA OF INDONESIA TBK	BSWD
9	PT BANK PERMATA TBK	BNLI
10	PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA	BNII
11	PT BANK CIMB NIAGA TBK	BNGA
12	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	BMRI
13	PT BANK SINARMAS TBK.	BSIM
14	PT BANK DANAMON TBK	BDMN
15	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)	BBTN
16	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	BBRI
17	PT BANK NUSA PARAHYANGAN TBK.	BBNP
18	PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK	MAYA
19	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)	BBNI
20	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK	BJBR
21	PT BANK CENTRAL ASIA TBK.	BBCA
22	PT BANK BUKOPIN TBK.	BBKP
23	PT. BANK SAUDARA 1906 TBK	SDRA
24	PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL TBK	MCOR
25	PT. BANK EKONOMI RAHARJA TBK.	BAEK
26	PT. BANK BUMI ARTA TBK	BNBA
27	PT BANK PAN INDONESIA TBK.	PNBN

2. Indikator X dan Y

No.	Kode Bank	Tahun	ROA	Komisaris Independen	Dewan Direksi	Komite Audit	Kepemilikan Institusional
1	AGRO	2011	0,012923	50%	4	3	0,14
2	AGRO	2012	0,01274	50%	5	3	0,14
3	AGRO	2013	0,013971	60%	5	3	0,14
4	BACA	2011	0,007308	66,6%	4	4	0,89
5	BACA	2012	0,011041	66,6%	4	3	0,89
6	BACA	2013	0,013075	66,6%	4	3	0,32
7	BAEK	2011	0,013529	66,6%	6	4	0,99
8	BAEK	2012	0,009733	66,6%	6	3	0,99
9	BAEK	2013	0,011295	66,6%	5	3	0,99
10	BBCA	2011	0,03566	60%	10	3	0,48
11	BBCA	2012	0,033152	60%	10	3	0,48
12	BBCA	2013	0,035897	60%	10	3	0,47
13	BBKP	2011	0,016445	50%	7	3	0,59
14	BBKP	2012	0,016127	66,6%	7	4	0,59
15	BBKP	2013	0,017185	66,6%	7	4	0,59
16	BBNI	2011	0,024949	57%	10	4	0,6
17	BBNI	2012	0,026701	57%	10	4	0,6
18	BBNI	2013	0,029169	57%	10	4	0,6
19	BBNP	2011	0,013961	50%	5	3	0,9
20	BBNP	2012	0,014022	50%	5	3	0,85
21	BBNP	2013	0,014213	50%	5	3	0,82

22	BBRI	2011	0,039915	62,5%	11	6	0,57
23	BBRI	2012	0,050623	62,5%	11	8	0,57
24	BBRI	2013	0,038103	62,5%	11	8	0,57
25	BBTN	2011	0,017081	50%	6	6	0,72
26	BBTN	2012	0,016673	50%	7	3	0,66
27	BBTN	2013	0,016321	50%	7	5	0,6
28	BDMN	2011	0,003249	50%	12	6	0,74
29	BDMN	2012	0,035218	50%	11	6	0,74
30	BDMN	2013	0,030017	50%	11	6	0,74
31	BJBR	2011	0,02424	60%	5	4	0,75
32	BJBR	2012	0,021351	80%	6	5	0,75
33	BJBR	2013	0,024703	80%	4	6	0,75
34	BMRI	2011	0,029919	57%	11	5	0,6
35	BMRI	2012	0,032259	57%	11	6	0,6
36	BMRI	2013	0,03195	57%	11	6	0,6
37	BNBA	2011	0,019242	0	3	4	0,91
38	BNBA	2012	0,022238	0	3	4	0,91
39	BNBA	2013	0,019491	0	3	4	0,91
40	BNGA	2011	0,026329	44,4%	12	6	0,97
41	BNGA	2012	0,029314	80%	11	6	0,97
42	BNGA	2013	0,026646	80%	12	6	0,97
43	BNII	2011	0,00832	57%	8	5	0,93
44	BNII	2012	0,018866	50%	9	5	0,95
45	BNII	2013	0,012066	50%	8	4	0,97

46	BNLI	2011	0,015384	55,5%	9	3	0,89
47	BNLI	2012	0,014326	50%	9	4	0,89
48	BNLI	2013	0,013878	50%	10	4	0,89
49	BSIM	2011	0,009309	50%	6	4	0,67
50	BSIM	2012	0,018841	66,6%	7	5	0,67
51	BSIM	2013	0,016398	66,6%	6	5	0,59
52	BSWD	2011	0,031023	50%	5	3	0,93
53	BSWD	2012	0,029095	50%	4	3	0,93
54	BSWD	2013	0,030429	50%	5	3	0,93
55	BTPN	2011	0,037973	50%	9	5	0,58
56	BTPN	2012	0,04206	50%	10	5	0,58
57	BTPN	2013	0,041181	50%	10	5	0,67
58	BVIC	2011	0,02027	66,6%	5	3	0,54
59	BVIC	2012	0,017599	75%	6	3	0,53
60	BVIC	2013	0,017222	75%	7	3	0,53
61	INPC	2011	0,006554	50%	6	4	0,53
62	INPC	2012	0,006801	57%	6	5	0,52
63	INPC	2013	0,013857	57%	6	6	0,51
64	MAYA	2011	0,017796	60%	6	3	0,81
65	MAYA	2012	0,020455	60%	6	3	0,81
66	MAYA	2013	0,021221	60%	6	3	0,86
67	MCOR	2011	0,007497	33,3%	4	0	0,19
68	MCOR	2012	0,019709	50%	4	3	0,19
69	MCOR	2013	0,014994	66,6%	5	3	0,19

70	MEGA	2011	0,019244	50%	7	3	0,58
71	MEGA	2012	0,024012	50%	8	3	0,58
72	MEGA	2013	0,009516	50%	9	3	0,58
73	NISP	2011	0,016811	57%	10	4	0,85
74	NISP	2012	0,015444	50%	9	4	0,85
75	NISP	2013	0,015685	50%	11	4	0,85
76	PNBN	2011	0,021934	50%	11	4	0,85
77	PNBN	2012	0,020448	50%	11	4	0,85
78	PNBN	2013	0,019824	50%	11	4	0,85
79	SDRA	2011	0,023951	50%	4	3	0,11
80	SDRA	2012	0,021042	50%	4	3	0,33
81	SDRA	2013	0,020423	50%	4	3	0,33

3. Hasil Olah Data

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00798841
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.068
Kolmogorov-Smirnov Z		.673
Asymp. Sig. (2-tailed)		.755

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data diolah menggunakan SPSS 17

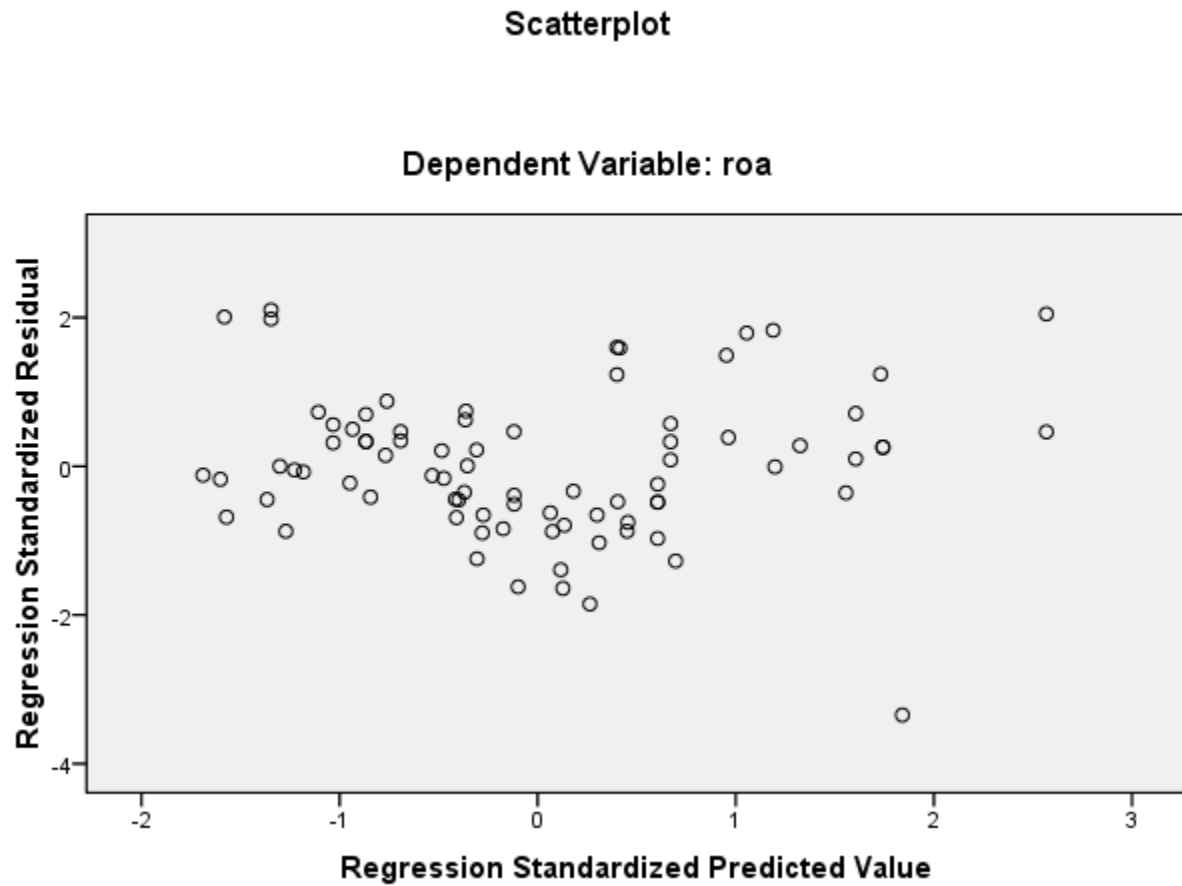
2. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model		Collinearity Statistics
		Tolerance VIF
1	(Constant)	
	Komisaris Independen	.936 1.068
	Dewan Direksi	.678 1.475
	Komite Audit	.686 1.457
	Kepemilikan Institusional	.925 1.081

a. Dependent Variable: roa

Data diolah menggunakan SPSS 17

3. Uji Heteroskedastisitas



Data diolah menggunakan SPSS 17

4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.547 ^a	.299	.263	.00820	1.867

a. Predictors: (Constant), kep.inst, kom.ind, kom.au, dew.dir

b. Dependent Variable: roa

Data diolah menggunakan SPSS 17

5. Uji Descriptive Statistic

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	81	.00	.05	.0208	.00954
KomisarisIndependen	81	.00	.80	.5481	.14089
DewanDireksi	81	3.00	12.00	7.3951	2.71882
KomiteAudit	81	.00	8.00	4.0741	1.32077
KepemilikanInstitusional	81	.11	.99	.6735	.23483
Valid N (listwise)	81				

Data diolah menggunakan SPSS 17

6. Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.002	4	.001	8.120	.000 ^a
Residual	.005	76	.000		
Total	.007	80			

a. Predictors: (Constant), kep.inst, kom.ind, kom.au, dew.dir

b. Dependent Variable: roa

Data diolah menggunakan SPSS 17

7. Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.011	.005		2.177	.033
	KomisarisIndependen	-.005	.007	-.078	-.781	.437
	DewanDireksi	.001	.000	.351	3.009	.004
	KomiteAudit	.002	.001	.302	2.607	.011
	KepemilikanInstitusional	-.008	.004	-.191	-1.909	.060

a. Dependent Variable: roa

Data diolah menggunakan SPSS 17

8. Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.547 ^a	.299	.263	.00820	1.867

a. Predictors: (Constant), kep.inst, kom.ind, kom.au, dew.dir

b. Dependent Variable: roa

Data diolah menggunakan SPSS 17

4. Perhitungan Data Histogram

1. Komisaris independen.

$$\begin{aligned}\text{Jangkauan (j)} &= \text{nilai terbesar} - \text{nilai terkecil} \\ &= 80 - 0 \\ &= 80\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kelas interval (k)} &= 1 + 3,3 \log n \\ &= 1 + 3,3 \log 81 \\ &= 7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Panjang kelas (c)} &= j / k \\ &= 80 / 7 \\ &= 11\end{aligned}$$

2. Dewan direksi

$$\begin{aligned}\text{Jangkauan (j)} &= \text{nilai terbesar} - \text{nilai terkecil} \\ &= 12 - 3 \\ &= 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kelas interval (k)} &= 1 + 3,3 \log n \\ &= 1 + 3,3 \log 81 \\ &= 7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Panjang kelas (c)} &= j / k \\ &= 9 / 7 \\ &= 1\end{aligned}$$

3. Komite audit.

$$\begin{aligned}\text{Jangkauan (j)} &= \text{nilai terbesar} - \text{nilai terkecil} \\ &= 8 - 0 \\ &= 8\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kelas interval (k)} &= 1 + 3,3 \log n \\
 &= 1 + 3,3 \log 81 \\
 &= 7
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Panjang kelas (c)} &= j / k \\
 &= 8 / 7 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

4. Kepemilikan institusional.

$$\begin{aligned}
 \text{Jangkauan (j)} &= \text{nilai terbesar} - \text{nilai terkecil} \\
 &= 97 - 11 \\
 &= 86
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kelas interval (k)} &= 1 + 3,3 \log n \\
 &= 1 + 3,3 \log 81 \\
 &= 7
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Panjang kelas (c)} &= j / k \\
 &= 86 / 7 \\
 &= 11
 \end{aligned}$$

5. *Return on Asset* (ROA).

$$\begin{aligned}
 \text{Jangkauan (j)} &= \text{nilai terbesar} - \text{nilai terkecil} \\
 &= 5,1 - 0,3 \\
 &= 4,8
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kelas interval (k)} &= 1 + 3,3 \log n \\
 &= 1 + 3,3 \log 81 \\
 &= 7
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Panjang kelas (c)} &= j / k \\
 &= 4,8 / 7 \\
 &= 0,6
 \end{aligned}$$

5. ICMD

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Banking

Head Office Gedung BNI, 29th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
Phone (021) 251-1946, 572-8387, 572-8043
Fax (021) 572-8805
Telex. 65511,65512 KBBNI IA
PO Box 2955 JKT 10220
E-mail: investor.relation@bni.co.id
Home Page: <http://www.bni.co.id>

Business Banking
Company Status BUMN (state owned enterprise)

Financial Performance: Bank's net profit in 2013 reached Rp 6.24 trillion, decrease compared to the year 2012 which booked at Rp 7.20 trillion.

Brief History: Initially referred to by its unabbreviated name of Bank Negara Indonesia when it was established in 1946, BNI is the first bank formed and owned by the Indonesian Government.

Historical records indicate that on of the eve of the 30th of October 1946, or merely a few months after its formal establishment, the Bank distributed the first currency bills ever issued by Indonesia's Government popularly known at the time as ORI, or 'Oeang Republik Indonesia' (Currency of the Republic of Indonesia). In fact, this day is commemorated annually as the National Finance Day while the date of the Bank's establishment - the 5th of July - was designated as National Bank Day.

Bank Negara Indonesia's role as the circulation and central bank was duly terminated in 1949 following the government's appointment of the former Dutch-controlled bank, De Javasche Bank, as Indonesia's Central Bank. The Bank, subsequently designated as a development bank, was later granted the rights to provide foreign reserve services that allowed it access to direct foreign transactions.

Enhanced by increased capitalization, the Bank's legal status was formally changed to that of a state-owned commercial Bank in 1995. This provided the Bank with the foundation to provide better and wider range of both access and services for the country's business sectors.

In its quest to competitively differentiate itself from its competitors, the Bank decided, towards the end of 1968, to attach its year of establishment to its corporate name to become Bank Negara Indonesia 1946. The Bank was therefore popularly referred to, for decades, as 'BNI 46'. The simpler name of 'Bank BNI' was adopted in 1988 along with the change of the corporate identity.

BNI's legal status was upgraded in 1992 to that of a state-owned limited corporation under the name of PT Bank Negara Indonesia (Persero) and the bank decided to become a public company through its initial public offering of its shares in 1996.

BNI's ability to adapt to environmental, socio-cultural and technological advances is reflected through the continuous refinement of its corporate identity which is carried out to suit the changing demands and trends of the times. This adaptability signifies the Bank's dedication and commitment towards continuous improvement of its performance.

A refined corporate identity was introduced in 2004 that reflects the positive prospects for the future after a year of struggle characterized by a period of hardship. A shorter name of 'BNI' subsequently replaced the former 'Bank BNI', while the year of its establishment - '46' - was exposed through the logomark to reinforce the pride and distinction that the Bank had in being the country's first national bank.

In keeping with the spirit of the heroic national struggle that is rooted in its history, BNI strives to provide the best services for the country and to ultimately become the Pride of the Nation, today and always.

Shareholders

Indonesia Government	60.00%
Public	40.00%

Summary of Financial Statement

	(Million Rupiah)		
	2011	2012	2013
Total Assets	299,058,161	333,303,506	389,654,815
Cash and cash equivalents	27,223,329	36,232,469	37,322,115
Cash	6,197,731	7,989,380	10,089,627
Bank Indonesia	18,995,328	22,422,083	23,130,059
Other banks	2,130,270	5,841,006	4,102,129
Placements in Other Banks	49,328,028	32,616,862	23,472,702
Notes and Securities	46,498,258	46,370,975	53,397,654
Loans	158,223,131	193,050,166	243,757,607
Investments	41,669	24,026	39,507
Fixed Assets	4,052,708	4,591,587	5,513,569
Other Assets	13,691,038	16,417,621	23,151,461
Liabilities	261,215,137	289,775,215	338,971,310
Total Deposits	235,263,224	257,660,841	291,860,195
Demand deposits	69,984,253	73,365,578	88,133,377
Time deposits	66,866,161	84,211,610	91,607,184
Savings deposits	81,412,810	100,083,453	111,799,634
Call Money	2,161,199	2,725,597	1,759,670
Notes Issued	264,622	4,768,810	6,036,533
Loans of which	8,725,799	8,454,543	18,950,523
Subordinated	n.a	n.a	n.a
Other Liabilities	14,800,296	16,168,424	20,334,189
Shareholders' Equity	37,843,024	43,525,291	47,683,505
Paid-up capital	9,054,807	9,054,807	9,054,807
Paid-up capital in excess of par value	14,568,468	14,568,468	14,568,468
Revaluation of fixed assets	n.a	n.a	n.a
Retained earnings (accumulated loss)	14,219,749	19,902,016	24,060,230
Revenue	26,293,271	30,989,788	35,891,612
Operating Expenses	21,050,888	22,348,765	24,672,809
Operating Profit (Loss)	7,242,583	8,641,023	11,218,803
Other Income (Expenses)	218,725	258,539	59,362
Profit (Loss) before Taxes	7,461,308	8,899,562	11,278,165
Comprehensive Profit (Loss)	5,991,144	7,202,604	6,243,854
Revenue Breakdown			
Interest Income	19,564,460	20,982,244	26,450,708
Other Income	8,728,811	10,027,544	9,440,904
Expense Breakdown			
Interest Paid	7,020,320	6,364,362	7,392,427
Others	14,030,368	15,984,373	17,280,382
Per Share Data (Rp)			
Earnings (Loss) per Share	321	366	335
Equity per Share	2,029	2,334	2,557
Dividend per Share	62	113	146
Closing Price	3,600	3,700	3,950
Financial Ratios			
PER (x)	11.83	9.58	11.80
PBV (x)	1.87	1.59	1.54
Dividend Payout (%)	19.46	29.35	43.52
Dividend Yield (%)	0.02	0.03	0.04
Cash and Banks to Demand Deposits (x)	0.41	0.49	0.42
Cash and Banks to Total Deposits (x)	0.12	0.14	0.13
Equity to Total Assets (x)	0.13	0.13	0.12
Loans to Total Deposits (x)	0.67	0.75	0.84
Operating Profit Margin (x)	0.26	0.28	0.31
Net Profit Margin (x)	0.21	0.23	0.17
ROI (%)	2.00	2.16	1.61
ROE (%)	15.83	16.55	13.09

PER = 10.44x ; PBV = 1.86x (June 2014)

Financial Year: December 31

Public Accountant: Tanudiredja, Wibisana & Rekan

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Banking

Head Office Menara Bank Jabar Banten
Jl. Naripan No. 12-14
Bandung 40111, Jawa Barat
Phone (022) 423-4868
Fax (022) 420-2995, 423-2153
Homepage: www.bankjabarbanten.co.id

Business Development Banking

Company Status PMDN

Financial Performance: The Company booked net income after tax at IDR1.376 trillion in 2013, increase from IDR1.193 trillion booked in 2012.

Brief History: The founding of Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat was backedgrounded by the the rules of the government of Republic of Indonesia number 33 in the year of 1960 about company act of determining by the Dutch and has been nationalized was located in Bandung by the name of NV Denis (De eerste Nederlandsche Indische Shareholding). The company was previously in mortgage bank. As the result of an act from government rules number 33 in the year of 1960 of West Java Government Province by Notary Public Noezar number 152 dated March 21st, 1961 and number 184 dated may 13th, 1961 and has been inaugurated with the letter of decision from the the governor of west java province number 7/GKDH/BPD/61 dated on May 205th, 1961, had founded PD Bank Karya Pembangunan with basic capital in the amount of Rp 2.500.000, 00.

In 1992, the activity of Bank Pembangunan Daerah has been raised to be Bank Umum Devisa based on the decision letter from the Director of Bank INDONESIA NUMBER 25/84/KEP/DIR dated on November 2nd, 1992 with based on region rules number 11 in the year of 1995 and has been called "Bank Jabar" with a new logo.

In order to fulfill the community's request on banking service based on Syariah, with the permission of Bank Indonesia number 2/18/DpG/DPIP dated April 12th, 2000, since April 15, 2000, Bank Jabar became the first Bank Pembangunan Daerah which had dual banking system which to give service in conventional system and syariah sytem.

Based on the result of meeting of the share holder (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dated July 3rd, 2007, along with the decision letter from Governor of Bank Indonesia number 9/63/KEP.GBI/2007 dated November 26, 2007, about the changes of business permit on behalf of the name PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat became business permit in the name of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten and with decision letter from board of directors number 1065/SK/DIR-PPN/2007 dated November 29th, 2007 therefore, the name of corporation has been changed to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat and Banten with call name Bank Jabar Banten

Based on the result of meeting of the share holder (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten number 26 dated April 21st, 2010, along with the letter from Bank Indonesia number 12/APBU/BD dated June 30th, 2010 in regards of the changes of logo with decision letter from board of directors number 1337/SK/DIR-PPN/2010 dated July 5th, 2010.

Shareholders

Government of West Java Province	38.26%
Local Government in West Java Province	23.61%
Local Government in Banten Province	7.76%
Government of Banten Province	5.37%
Ir. H. Muhadi, MSP	0.02%
Bien Subiantoro	0.02%
Public	24.96%

Summary of Financial Statement

	(Million Rupiah)		
	2011	2012	2013
Total Assets	54,448,658	70,840,878	70,959,233
Cash and Cash Equivalents	5,507,563	6,750,775	7,227,256
Cash	1,725,621	1,795,074	2,596,260
Bank Indonesia	3,673,929	4,666,015	4,454,108
Other banks	108,013	289,686	176,888
Placements in BI & Other Banks	7,779,255	9,011,739	2,628,985
Notes and Securities	11,366,843	15,710,254	10,291,810
Loans	26,490,566	34,768,723	44,289,060
Investments	28,850	27,720	24,415
Fixed Assets	559,884	734,873	699,069
Other Assets	2,715,697	4,836,794	5,797,638
Liabilities	47,089,955	61,764,614	60,896,825
Total Deposits	37,255,417	47,927,513	47,220,701
Call Money	n.a	n.a	n.a
Notes Issued	2,742,993	2,395,091	2,395,611
Taxes payable	1,300	45,556	101,575
Loans	173,898	231,160	324,337
Other Liabilities	6,916,247	11,165,294	10,953,500
Total Temporary Sytiah Fund	1,971,604	3,067,424	3,343,143
Shareholders' Equity	5,387,099	6,008,840	6,718,265
Paid-up capital	2,424,073	2,424,073	2,424,073
Paid-up capital			
in excess of par value	823,423	823,423	823,423
Retained earnings (accumulated loss)	2,139,603	2,761,344	3,470,769
Revenue	6,217,218	7,126,048	8,580,248
Operating Expenses	4,942,324	5,706,807	6,838,315
Operating Profit (Loss)	1,274,894	1,419,241	1,751,931
Other Income (Expenses)	44,922	93,258	943
Profit (loss) before Taxes	1,319,816	1,512,499	1,752,874
Comprehensive Profit (loss)	962,695	1,193,304	1,376,387
Revenue Breakdown			
Interest Income	5,977,050	6,795,686	8,132,988
Other Incomes	240,168	330,362	447,259
Expense Breakdown			
Interest Paid	2,915,841	3,140,311	3,350,845
Others	2,026,483	2,566,496	3,487,470
Per Share Data (Rp)			
Earnings (Loss) per Share	99	123	142
Equity per Share	556	620	693
Dividend per Share	61	68	78
Closing Price	910	1,060	890
Financial Ratios			
PER (x)	9.17	8.61	6.27
PBV (x)	1.64	1.71	1.28
Dividend Payout (%)	61.51	55.63	55.02
Dividend Yield (%)	10.99	11.05	11.27
Cash and Banks to Total Deposits (x)	0.15	0.14	0.15
Equity to Total Assets (x)	0.10	0.08	0.09
Loans to Total Deposits (x)	0.71	0.73	0.94
Operating Profit Margin (x)	0.21	0.20	0.20
Net Profit Margin (x)	0.15	0.17	0.16
ROI (%)	1.77	1.68	1.94
ROE (%)	17.57	19.86	20.49

PER = 8,09x ; PBV = 1,20x (June 2014)

Financial Year: December 31

Public Accountant: Punwantono, Suherman & Surja

PT Bank Victoria International Tbk.

Banking

Head Office Panin Tower 15th & 25th Floor, Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Jakarta 10270
Phone (021) 7278-1800
Fax (022) 7278-1900
Email: csecretary@victoriabank.co.id
Homepage: www.victoriabank.co.id

Business Banking

Company Status PMDN

Financial Performance: The Company booked net income amounted IDR251 billion in 2013, lower than last year income worth IDR283 billion.

Brief History: Bank Victoria was established as PT Bank Victoria on October 28, 1992, and has obtained operation licensed on August 10, 1994 as a commercial bank. The Bank has licensed as a foreign exchange bank in 1997. In 1999, the Bank listed its share at Jakarta Stock Exchange.

Summary of Financial Statement

	(Million Rupiah)		
	2011	2012	2013
Total Assets	11,802,663	14,352,840	19,171,352
Cash and Cash Equivalents	1,461,336	1,729,125	1,827,817
Cash	32,141	36,624	53,249
Bank Indonesia	1,429,195	1,692,501	1,774,568
Other banks	n.a	n.a	n.a
Placements in Other Banks	1,235,538	631,933	761,046
Notes and Securities	3,247,670	4,048,361	3,101,680
Loans	5,558,636	7,580,957	10,216,074
Investments	60	60	60
Fixed Assets	158,519	197,376	195,949
Other Assets	140,804	165,038	3,068,746
Liabilities	10,560,449	12,883,648	17,526,576
Total Deposits	9,249,008	11,515,732	15,132,257
Demand deposits	358,724	671,451	1,102,048
Time deposits	8,263,998	9,769,990	13,327,763
Savings deposits	626,286	874,291	702,446
Call Money	n.a	n.a	n.a
Notes Issued	399,816	493,737	990,843
Other Liabilities	941,625	874,179	1,403,476
Shareholders' Equity	1,212,114	1,469,164	1,644,776
Paid-up capital	384,674	416,805	601,962
Paid-up capital in excess of par value	21,945	21,945	21,945
Retained earnings	805,495	1,030,414	1,020,869
Revenue	1,082,903	1,210,220	1,721,335
Operating Expenses	851,225	974,129	1,407,125
Operating Profit	231,678	236,091	314,210
Other Income (Expenses)	7,554	16,503	15,961
Profit (loss) before Taxes	239,232	252,594	330,171
Comprehensive Profit (loss)	219,914	263,929	251,348
Revenue Breakdown			
Interest Income	815,125	1,090,988	1,542,463
Other Income	267,778	119,234	178,872
Expense Breakdown			
Interest Paid	665,143	758,201	1,095,872
Others	186,082	215,928	311,253
Per Share Data (Rp)			
Earnings per Share	29	68	42
Equity per Share	158	353	273
Dividend per Share	n.a	n.a	n.a
Closing Price	129	117	125
Financial Ratios			
PER (x)	4.51	1.72	2.99
PBV (x)	0.82	0.33	0.46
Dividend Payout (%)	n.a	n.a	n.a
Dividend Yield (%)	n.a	n.a	n.a
Cash and Banks			
to Demand Deposits (x)	4.07	1.98	1.66
Cash and Banks to Total Deposits (x)	0.16	0.15	0.12
Equity to Total Assets (x)	0.10	0.10	0.09
Loans to Total Deposits (x)	0.60	0.66	0.68
Operating Profit Margin (x)	0.21	0.20	0.18
Net Profit Margin (x)	0.20	0.23	0.15
ROI (%)	1.86	1.98	1.31
ROE (%)	18.14	19.33	15.28
PER = 4.55x ; PBV = 0.48x (June 2014)			
Financial Year: December 31			
Public Accountant: Tjahjadi & Tamara			

Shareholders

PT Victoria Investama Tbk	34.72%
Suzanna Tanojo	13.30%
Atrium Asia Investment Management Pte., Ltd.	8.82%
PT Suryayudha Investindo Cipta	6.32%
PT Nata Patindo	3.32%
Public	33.52%

6. Laporan Keuangan

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 DAN 1 JANUARI 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2013	31 Desember 2012 *)	1 Januari 2012 *)
ASET				
Kas	2c, 2g	19.051.934	15.482.025	11.572.429
Giro pada Bank Indonesia	2c, 2g, 2h, 4	43.904.419	38.272.155	36.152.674
Giro pada Bank Lain	2c, 2f, 2g, 2h, 5			
Pihak berelasi	55	39.388	16.079	44.516
Pihak ketiga		<u>14.008.687</u>	<u>9.635.693</u>	<u>9.783.153</u>
		14.048.075	9.651.772	9.827.669
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		<u>(11.591)</u>	<u>(6.268)</u>	<u>(10.841)</u>
Jumlah Giro pada Bank Lain - bersih		14.036.484	9.645.504	9.816.828
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	2c, 2f, 2i, 6			
Pihak berelasi	55	916.782	1.343.968	785.494
Pihak ketiga		<u>44.302.651</u>	<u>46.979.515</u>	<u>50.754.297</u>
		45.219.433	48.323.483	51.539.791
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		<u>(105.599)</u>	<u>(85.258)</u>	<u>(146.729)</u>
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - bersih		45.113.834	48.238.225	51.393.062
Efek-efek	2c, 2f, 2j, 7			
Pihak berelasi	55	8.937.255	4.190.754	6.398.232
Pihak ketiga		<u>18.451.995</u>	<u>16.376.099</u>	<u>14.451.931</u>
		27.389.250	20.566.853	20.850.163
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi, keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari kenaikan/(penurunan) nilai wajar efek-efek dan cadangan kerugian penurunan nilai		<u>(586.702)</u>	<u>(243.000)</u>	<u>(330.481)</u>
Jumlah Efek-efek - bersih		26.802.548	20.323.853	20.519.682
Obligasi Pemerintah - Pihak berelasi	2c, 2f, 2k, 8, 55	82.227.428	79.072.173	78.661.519
Tagihan Lainnya - Transaksi Perdagangan	2c, 2f, 2l, 9			
Pihak berelasi	55	3.904.858	3.784.548	2.752.711
Pihak ketiga		<u>5.043.525</u>	<u>2.889.870</u>	<u>3.138.579</u>
		8.948.383	6.674.418	5.891.290
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		<u>(1.424.454)</u>	<u>(1.125.015)</u>	<u>(1.079.302)</u>
Jumlah Tagihan Lainnya - Transaksi Perdagangan - bersih		7.523.929	5.549.403	4.811.988
Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	2c, 2f, 2m, 10			
Pihak berelasi	55	-	-	758.703
Pihak ketiga		<u>3.737.613</u>	<u>14.515.235</u>	<u>11.611.182</u>
Jumlah Tagihan atas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali - bersih		3.737.613	14.515.235	12.369.885
Tagihan Derivatif	2c, 2f, 2n, 11			
Pihak berelasi	55	2.792	231	4.391
Pihak ketiga		<u>168.086</u>	<u>86.912</u>	<u>109.266</u>
Jumlah Tagihan Derivatif - bersih		170.878	87.143	113.657
Kredit yang Diberikan	2c, 2f, 2o, 12			
Pihak berelasi	55	57.315.200	45.952.610	36.846.173
Pihak ketiga		<u>409.855.249</u>	<u>338.629.096</u>	<u>274.247.133</u>
Jumlah Kredit yang Diberikan		467.170.449	384.581.706	311.093.306
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		<u>(16.535.651)</u>	<u>(14.011.350)</u>	<u>(12.105.048)</u>
Jumlah Kredit yang Diberikan - bersih		450.634.798	370.570.356	298.988.258

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 64.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.



PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 DAN 1 JANUARI 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012 *)</u>	<u>1 Januari 2012 *)</u>
ASET (lanjutan)				
Piutang Pembiayaan Konsumen	2c, 2f, 2p, 13			
Pihak berelasi	55	5.738	5.197	5.876
Pihak ketiga		<u>4.639.163</u>	<u>3.913.949</u>	<u>3.242.684</u>
		4.644.901	3.919.146	3.248.560
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		<u>(133.356)</u>	<u>(90.777)</u>	<u>(62.990)</u>
Jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen - bersih		4.511.545	3.828.369	3.185.570
Investasi Bersih dalam Sewa Pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp7.537 dan Rp1.767 dan Rp197 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Januari 2012	2c, 2q, 14	612.154	327.680	38.785
Tagihan Akseptasi	2c, 2f, 2u, 15			
Pihak berelasi	55	779.807	1.505.031	892.184
Pihak ketiga		<u>9.398.563</u>	<u>6.452.481</u>	<u>5.658.919</u>
		10.178.370	7.957.512	6.551.103
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		<u>(63.481)</u>	<u>(37.041)</u>	<u>(40.667)</u>
Jumlah Tagihan Akseptasi - bersih		10.114.889	7.920.471	6.510.436
Penyertaan Saham - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp3.224, Rp3.044 dan Rp829 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Januari 2012	2s, 16	4.667	4.306	6.498
Biaya Dibayar Dimuka	17	1.489.010	1.435.757	1.404.758
Pajak Dibayar Dimuka	2ad, 33a	1.126.549	28.174	21.540
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp5.612.651, Rp4.938.075 dan Rp4.346.115 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Januari 2012	2r, 18	7.645.598	7.002.690	6.049.246
Aset Tidak Berwujud - setelah dikurangi amortisasi masing-masing sebesar Rp1.354.113, Rp1.213.891 dan Rp1.125.502 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Januari 2012	2r.i, 2s, 19	1.160.255	860.702	698.713
Aset Lain-lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian masing-masing sebesar Rp289.412, Rp276.769 dan Rp300.005 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Januari 2012	2c, 2t, 2v, 20	8.908.732	8.487.874	5.775.764
Aset Pajak Tangguhan	2ad, 33e	<u>4.322.498</u>	<u>3.966.613</u>	<u>3.800.412</u>
JUMLAH ASET		<u>733.099.762</u>	<u>635.618.708</u>	<u>551.891.704</u>

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 DAN 1 JANUARI 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012 *)</u>	<u>1 Januari 2012 *)</u>
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Segera	2w	762.130	1.694.231	1.301.472
Simpanan Nasabah				
Giro	2c, 2f, 2x, 21			
Pihak berelasi	55	26.507.150	25.554.282	23.327.168
Pihak ketiga		<u>96.920.499</u>	<u>88.353.574</u>	<u>69.203.418</u>
Jumlah Giro		<u>123.427.649</u>	<u>113.907.856</u>	<u>92.530.586</u>
Tabungan	2c, 2f, 2x, 22			
Pihak berelasi	55	202.205	928.851	748.157
Pihak ketiga		<u>215.815.405</u>	<u>183.040.905</u>	<u>149.120.176</u>
Jumlah Tabungan		<u>216.017.610</u>	<u>183.969.756</u>	<u>149.868.333</u>
Deposito berjangka	2c, 2f, 2x, 23			
Pihak berelasi	55	27.976.500	21.604.790	28.651.516
Pihak ketiga		<u>141.574.497</u>	<u>123.355.461</u>	<u>113.678.168</u>
Jumlah Deposito berjangka		<u>169.550.997</u>	<u>144.960.251</u>	<u>142.329.684</u>
Jumlah Simpanan Nasabah		<u>508.996.256</u>	<u>442.837.863</u>	<u>384.728.603</u>
Simpanan dari Bank Lain				
Giro dan Tabungan	2c, 2f, 2y, 24			
Pihak berelasi	55	63.613	141.996	214.580
Pihak ketiga		<u>2.989.406</u>	<u>2.103.494</u>	<u>2.353.571</u>
Jumlah Giro dan Tabungan		<u>3.053.019</u>	<u>2.245.490</u>	<u>2.568.151</u>
Inter-bank call money - Pihak ketiga	2c, 2y, 25	<u>1.280.850</u>	<u>327.100</u>	<u>58.281</u>
Deposito berjangka	2c, 2y, 26			
Pihak ketiga		<u>8.109.444</u>	<u>11.444.247</u>	<u>9.691.453</u>
Jumlah Simpanan dari Bank Lain		<u>12.443.313</u>	<u>14.016.837</u>	<u>12.317.885</u>
Liabilitas kepada Pemegang Polis <i>Unit-Linked</i>	2z, 27	12.002.997	11.034.239	9.044.266
Liabilitas atas Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	2c, 2f, 2m, 28			
Pihak berelasi	55	1.509.324	-	-
Pihak ketiga		<u>3.146.825</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Liabilitas atas Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali		<u>4.656.149</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Liabilitas Derivatif	2c, 2f, 2n, 11			
Pihak berelasi	55	372	333	3.880
Pihak ketiga		<u>225.796</u>	<u>112.924</u>	<u>161.498</u>
Jumlah Liabilitas Derivatif		<u>226.168</u>	<u>113.257</u>	<u>165.378</u>
Liabilitas Akseptasi	2c, 2f, 2u, 29			
Pihak berelasi	55	445.929	262.481	286.007
Pihak ketiga		<u>9.732.441</u>	<u>7.695.031</u>	<u>6.265.096</u>
Jumlah Liabilitas Akseptasi		<u>10.178.370</u>	<u>7.957.512</u>	<u>6.551.103</u>
Efek-efek yang Diterbitkan	2c, 2f, 2aa, 30			
Pihak berelasi	55	328.000	205.000	158.000
Pihak ketiga		<u>1.454.862</u>	<u>1.343.076</u>	<u>2.056.177</u>
Dikurangi: Biaya penerbitan yang belum diamortisasi		<u>1.782.862</u>	<u>1.548.076</u>	<u>2.214.177</u>
Jumlah Efek-efek yang Diterbitkan		<u>(3.265)</u>	<u>(2.200)</u>	<u>(2.589)</u>
		<u>1.779.597</u>	<u>1.545.876</u>	<u>2.211.588</u>

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 DAN 1 JANUARI 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2013	31 Desember 2012 *)	1 Januari 2012 *)
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				
LIABILITAS (lanjutan)				
Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi	31c	200.501	189.085	234.364
Beban yang Masih Harus Dibayar	2c, 2af, 32	3.326.475	2.344.762	2.267.167
Utang Pajak	2ad, 33b			
Pajak Penghasilan		1.673.030	2.110.829	761.737
Pajak Lain-lain		<u>453.834</u>	<u>551.592</u>	<u>529.326</u>
Jumlah Utang Pajak		<u>2.126.864</u>	<u>2.662.421</u>	<u>1.291.063</u>
Liabilitas Imbalan Kerja	2ai, 34, 50	4.585.069	3.813.318	2.829.919
Provisi		822.582	746.821	728.094
Liabilitas Lain-lain	2c, 35	14.166.214	13.780.041	10.153.552
Pinjaman yang Diterima	2c, 2f, 2ab, 36			
Pihak berelasi	55	778.314	934.868	1.104.665
Pihak ketiga		<u>15.218.874</u>	<u>10.673.964</u>	<u>10.598.833</u>
Jumlah Pinjaman yang Diterima		<u>15.997.188</u>	<u>11.608.832</u>	<u>11.703.498</u>
Pinjaman Subordinasi	2c, 2f, 2ac, 37			
Pihak berelasi	55	1.939.800	1.936.800	1.895.000
Pihak ketiga		<u>2.525.815</u>	<u>3.201.150</u>	<u>3.956.798</u>
Jumlah Pinjaman Subordinasi		<u>4.465.615</u>	<u>5.137.950</u>	<u>5.851.798</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>596.735.488</u>	<u>519.483.045</u>	<u>451.379.750</u>
DANA SYIRKAH TEMPORER				
	2f, 2ae, 38			
Simpanan Nasabah				
Pihak berelasi	55			
Tabungan - Investasi Terikat dan Tabungan <i>Mudharabah</i> -				
Investasi Tidak Terikat	38a.2a	94.833	30.105	9.127
Deposito <i>Mudharabah</i> - Investasi Tidak Terikat	38a.3	<u>931.213</u>	<u>1.948.412</u>	<u>2.371.249</u>
Jumlah pihak berelasi		<u>1.026.046</u>	<u>1.978.517</u>	<u>2.380.376</u>
Pihak ketiga				
Giro - Investasi Terikat dan Giro <i>Mudharabah</i>				
<i>Musyarakah</i>	38a.1	17.875	3.158	85.602
Tabungan - Investasi Terikat dan Tabungan <i>Mudharabah</i> -				
Investasi Tidak Terikat	38a.2a	20.398.444	18.216.348	13.902.360
Deposito <i>Mudharabah</i> - Investasi Tidak Terikat	38a.3	<u>25.903.040</u>	<u>19.878.232</u>	<u>21.153.463</u>
Jumlah pihak ketiga		<u>46.319.359</u>	<u>38.097.738</u>	<u>35.141.425</u>
Jumlah Simpanan Nasabah		<u>47.345.405</u>	<u>40.076.255</u>	<u>37.521.801</u>
Simpanan dari Bank Lain				
Pihak ketiga				
Tabungan <i>Mudharabah</i> - Investasi Tidak Terikat	38b	144.876	181.054	162.546
Deposito <i>Mudharabah</i> - Investasi Tidak Terikat	38b	<u>83.397</u>	<u>122.765</u>	<u>173.199</u>
Jumlah Simpanan dari Bank Lain		<u>228.273</u>	<u>303.819</u>	<u>335.745</u>
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		<u>47.573.678</u>	<u>40.380.074</u>	<u>37.857.546</u>

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 64.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 DAN 1 JANUARI 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012 *)</u>	<u>1 Januari 2012 *)</u>
LIABILITAS, DANA SYIRKAH				
TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				
EKUITAS				
Modal Saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per lembar. Modal Dasar - 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna dan 31.999.999.999 lembar Saham Biasa Seri B. Modal Ditempatkan dan Disetor - 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna dan 23.333.333.332 lembar Saham Biasa Seri B pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Januari 2012	40a	11.666.667	11.666.667	11.666.667
Tambahan Modal Disetor/Agio Saham	40b	17.316.192	17.195.760	17.195.760
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	2e	221.620	47.677	56.794
Kerugian Bersih yang Belum Direalisasi dari Penurunan Nilai Wajar Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	2j, 2k, 2s	(1.417.240)	(409.449)	(631.529)
Saldo Laba (saldo rugi sebesar Rp162.874.901 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor/agio saham pada saat kuasi - reorganisasi pada tanggal 30 April 2003)				
- Sudah Ditentukan Penggunaannya	40c	7.431.162	5.927.268	5.927.268
- Belum Ditentukan Penggunaannya		<u>52.200.836</u>	<u>40.152.197</u>	<u>27.578.259</u>
Jumlah Saldo Laba		59.631.998	46.079.465	33.505.527
Kepentingan Nonpengendali atas Aset Bersih Entitas Anak yang Dikonsolidasi	2d, 39	<u>1.371.359</u>	<u>1.175.469</u>	<u>861.189</u>
JUMLAH EKUITAS		<u>88.790.596</u>	<u>75.755.589</u>	<u>62.654.408</u>
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		<u>733.099.762</u>	<u>635.618.708</u>	<u>551.891.704</u>

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 64.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah	2f, 2af, 41, 55	50.208.842	42.550.442
Beban Bunga dan Beban Syariah	2f, 2af, 42, 55	<u>(17.432.216)</u>	<u>(15.019.850)</u>
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH - BERSIH		<u>32.776.626</u>	<u>27.530.592</u>
Pendapatan Premi	2ag	6.446.149	5.664.495
Beban Klaim	2ag	<u>(3.820.143)</u>	<u>(3.501.423)</u>
PENDAPATAN PREMI - BERSIH		2.626.006	2.163.072
PENDAPATAN BUNGA, SYARIAH DAN PREMI - BERSIH		<u>35.402.632</u>	<u>29.693.664</u>
Pendapatan Operasional Lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	2ah	8.704.095	7.400.355
Laba selisih kurs - bersih	2e	1.853.099	1.094.476
Lain-lain	43	<u>4.129.443</u>	<u>3.402.991</u>
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		<u>14.686.637</u>	<u>11.897.822</u>
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	2c, 44	(4.871.442)	(3.423.067)
Pembalikan Penyisihan Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi	2c, 31c	10.784	43.937
Pembalikan/(Pembentukan) Penyisihan Kerugian	2t, 45	4.324	(13.090)
(Kerugian)/Keuntungan yang Belum Direalisasi dari (Penurunan)/Kenaikan Nilai Wajar Efek-efek, Obligasi Pemerintah dan Investasi Pemegang Polis pada Kontrak <i>Unit-Linked</i>	2j, 2k, 2z, 46	(219.353)	42.470
Keuntungan dari Penjualan Efek-efek dan Obligasi Pemerintah	2j, 2k, 47	39.116	296.739
Beban Operasional Lainnya			
Beban gaji dan tunjangan	2f, 2ai, 48, 50, 55	(9.431.337)	(8.045.716)
Beban umum dan administrasi	2r, 49	(9.898.400)	(8.253.902)
Lain-lain - bersih	51	<u>(2.171.250)</u>	<u>(2.613.410)</u>
Jumlah Beban Operasional Lainnya		<u>(21.500.987)</u>	<u>(18.913.028)</u>
LABA OPERASIONAL		23.551.711	19.625.447
Pendapatan Bukan Operasional - Bersih	52	<u>510.126</u>	<u>878.821</u>
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK DAN KEPENTINGAN NONPENGENDALI		24.061.837	20.504.268
Beban Pajak			
Kini	2ad, 33c, 33d	(5.288.489)	(4.640.513)
Tangguhan	2ad, 33c, 33e	<u>56.586</u>	<u>179.863</u>
Jumlah Beban Pajak - Bersih		<u>(5.231.903)</u>	<u>(4.460.650)</u>
LABA BERSIH		<u>18.829.934</u>	<u>16.043.618</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Pendapatan Komprehensif Lain			
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	2e	173.943	(9.117)
(Kerugian)/Keuntungan Bersih yang Belum Direalisasi dari (Penurunan)/Kenaikan Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	2j, 2k	(1.259.738)	277.581
Pajak Penghasilan Terkait dengan Laba Komprehensif Lain		<u>251.947</u>	<u>(55.501)</u>
Pendapatan Komprehensif Lain - Setelah Pajak		<u>(833.848)</u>	<u>212.963</u>
TOTAL LABA KOMPREHENSIF		<u>17.996.086</u>	<u>16.256.581</u>
Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada:			
Pemilik Entitas Induk		18.203.753	15.504.067
Kepentingan Nonpengendali	2d	<u>626.181</u>	<u>539.551</u>
		<u>18.829.934</u>	<u>16.043.618</u>
Laba Komprehensif yang Diatribusikan kepada:			
Pemilik Entitas Induk		17.369.905	15.717.030
Kepentingan Nonpengendali	2d	<u>626.181</u>	<u>539.551</u>
		<u>17.996.086</u>	<u>16.256.581</u>
LABA PER SAHAM	2aj		
Dasar (dalam Rupiah penuh)		780,16	664,46
Dilusi (dalam Rupiah penuh)		780,16	664,46

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Disetor/ Agio Saham	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Kerugian Bersih yang Belum Direalisasi dari Penurunan Nilai Wajar Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	Sudah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah	Kepentingan Non Pengendali atas Aset Bersih Entitas Anak yang Dikonsolidasi **)	Jumlah Ekuitas
Saldo pada tanggal 1 Januari 2013		11.666.667	17.195.760	47.677	(409.449)	5.927.268	40.152.197	46.079.465	1.175.469	75.755.589
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2012	40c	-	-	-	-	-	(4.651.220)	(4.651.220)	-	(4.651.220)
Pembentukan cadangan khusus dari laba bersih tahun 2012	40c	-	-	-	-	1.503.894	(1.503.894)	-	-	-
Kepentingan nonpengendali atas pembayaran dividen, konsolidasi reksadana oleh Entitas Anak dan perubahan ekuitas Entitas Anak	2d	-	-	-	-	-	-	-	(430.291)	(430.291)
Laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013		-	-	173.943	(1.007.791)	-	18.203.753	18.203.753	626.181	17.996.086
Keuntungan dari penjualan Entitas Anak kepada entitas sepengendali dan lainnya	1g, 40b	-	120.432	-	-	-	-	-	-	120.432
Saldo pada tanggal 31 Desember 2013		<u>11.666.667</u>	<u>17.316.192</u>	<u>221.620</u>	<u>(1.417.240)</u>	<u>7.431.162</u>	<u>52.200.836</u>	<u>59.631.998</u>	<u>1.371.359</u>	<u>88.790.596</u>

*) Saldo rugi sebesar Rp162.874.001 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor/agio saham pada saat kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 April 2003.

**) Direklasifikasi, lihat Catatan 64.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Disetor/ Agió Saham	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Kerugian Bersih yang Belum Direalisasi dari Penurunan Nilai Wajar Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tanggungan	Saldo Laba*)			Kepentingan Non Pengendali atas Aset Bersih Entitas Anak yang Dikonsolidasi **)	Jumlah Ekuitas	
					Sudah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2012		11.666.667	17.195.760	56.794	(631.529)	5.927.268	27.578.259	33.505.527	861.189	62.654.408
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2011	40c	-	-	-	-	-	(2.449.209)	(2.449.209)	-	(2.449.209)
Alokasi laba bersih tahun 2011 untuk Dana Program Kemitraan dan Dana Bina Lingkungan	40c	-	-	-	-	-	(491.875)	(491.875)	-	(491.875)
Kepentingan nonpengendali atas pembayaran dividen, konsolidasi reksadana oleh Entitas Anak dan perubahan ekuitas Entitas Anak	2d	-	-	-	-	-	10.755	10.755	552.005	562.760
Laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012		-	-	(9.117)	222.080	-	15.504.067	15.504.067	539.551	16.256.581
Reklasifikasi kepentingan nonpengendali atas reksadana Entitas Anak	64	-	-	-	-	-	-	-	(777.276)	(777.276)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2012		11.666.667	17.195.760	47.677	(409.449)	5.927.268	40.152.187	46.079.465	1.175.469	75.755.589

^{*)} Saldo rugi sebesar Rp162.874.901 telah dieliminasi dengan tambahan modal disetor/agio saham pada saat kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 April 2003.

^{**)} Direklasifikasi, lihat Catatan 64.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	2013	2012 *)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Penerimaan pendapatan bunga dan pendapatan syariah	48.006.235	41.306.034
Penerimaan pendapatan provisi, komisi dan premi - bersih	11.330.101	9.563.427
Pembayaran beban bunga dan beban syariah	(17.291.592)	(15.061.545)
Penerimaan dari penjualan Obligasi Pemerintah - untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	26.689.634	63.020.694
Pembelian Obligasi Pemerintah - untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(26.364.288)	(63.299.911)
Laba/(rugi) selisih kurs - bersih	(1.684.990)	542.860
Pendapatan operasional lainnya	1.126.887	878.819
Beban operasional lainnya	(1.295.075)	(2.449.179)
Beban gaji dan tunjangan	(8.659.586)	(7.062.317)
Beban umum dan administrasi	(8.935.985)	(7.543.342)
Pendapatan bukan operasional	<u>523.356</u>	<u>878.821</u>
Arus kas dari aktivitas operasional sebelum perubahan aset dan liabilitas operasional	23.444.697	20.774.361
Penurunan/(kenaikan) atas aset operasional:		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(975.057)	43.263
Efek-efek - untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(743.827)	1.021.680
Tagihan lainnya - transaksi perdagangan	(2.273.965)	(783.128)
Kredit yang diberikan	(85.610.294)	(74.972.786)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	10.777.622	(2.145.350)
Piutang pembiayaan konsumen	(833.329)	(762.916)
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	(291.229)	(290.465)
Pajak dibayar dimuka	(1.098.375)	(6.634)
Biaya dibayar dimuka	(53.253)	(30.999)
Aset lain-lain	172.342	(2.466.353)
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	3.002.556	2.550.099
Kenaikan/(penurunan) atas liabilitas operasional dan dana <i>syirkah</i> temporer:		
Bank Konvensional		
Giro	10.098.878	20.800.328
Tabungan	32.276.298	34.355.704
Deposito berjangka	21.255.943	4.383.361
Inter-bank call money	953.750	268.819
Liabilitas segera	(932.101)	392.759
Liabilitas kepada pemegang polis <i>unit-linked</i>	968.758	1.989.973
Utang pajak lainnya	(211.620)	10.573
Pembayaran pajak penghasilan badan	(5.911.725)	(3.266.066)
Liabilitas lain-lain	1.523.844	4.659.131
Bank Syariah - Dana <i>Syirkah</i> Temporer		
Investasi terikat giro dan giro <i>mudharabah musytarakah</i>	14.717	(82.444)
Investasi terikat tabungan dan investasi tidak terikat tabungan <i>mudharabah</i>	2.210.646	4.353.474
Investasi tidak terikat deposito <i>mudharabah</i>	<u>4.968.241</u>	<u>(1.748.502)</u>
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional	<u>12.733.517</u>	<u>9.047.882</u>

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 64.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2013</u>	<u>2012 *)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Kenaikan efek-efek - tersedia			
untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo		(6.410.209)	(97.314)
(Kenaikan)/penurunan Obligasi Pemerintah - tersedia			
untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo		(4.642.580)	376.925
Penerimaan dari penjualan aset tetap		119.287	94.547
Pembelian aset tetap	18	(1.584.388)	(1.668.666)
Pembelian aset tidak berwujud	19	(439.775)	(251.873)
Penjualan saham PT Bumi Daya Plaza	1g	264.000	-
Penjualan saham PT Usaha Gedung Mandiri	1g	132.000	-
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(12.561.665)	(1.546.381)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penurunan/(kenaikan) investasi di Entitas Anak		98.830	(1.002.251)
Kenaikan/(penurunan) atas efek-efek yang diterbitkan		233.721	(665.712)
Kenaikan/(penurunan) atas pinjaman yang diterima		6.688.977	(185.754)
Pembayaran atas pinjaman subordinasi		(672.335)	(713.848)
Kenaikan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	28	4.656.149	-
Pembayaran dividen, dana program kemitraan dan program bina lingkungan	40c	(4.651.220)	(2.940.884)
Kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan		6.354.122	(5.508.449)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		6.525.974	1.993.052
DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		2.993.395	642.083
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		111.503.789	108.868.654
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		121.023.158	111.503.789
Kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari:			
Kas		19.051.934	15.482.025
Giro pada Bank Indonesia	4	43.904.419	38.272.155
Giro pada bank lain	5	14.048.075	9.651.772
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		44.018.730	48.097.837
Jumlah kas dan setara kas		121.023.158	111.503.789
Informasi Tambahan Arus Kas			
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:			
Kerugian yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan		(1.417.240)	(409.449)
Pembelian aset tetap yang masih terhutang		(812.181)	(570.233)

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 64.

RIWAYAT HIDUP



Heri Septiawan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir di Jakarta pada 28 September 1991. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Mekarsari VI Depok pada tahun 2003 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 208 Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan SMP selama tiga tahun, pada 2006 penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA dan bersekolah di SMA Negeri 99 Jakarta dan lulus pada tahun 2009.

Pada tahun 2009 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi melalui jalur mandiri. Selama menjadi mahasiswa, penulis beberapa kali mengikuti kejuaraan Dekan Cup yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penulis juga sempat aktif di BEM FE UNJ periode 2011-2012 dan ditempatkan menjadi anggota di divisi olahraga.

Penulis pernah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Asuransi Jasindo pada bulan juli sampai agustus 2011 dan ditempatkan pada divisi Akuntansi dan Anggaran. Penulis juga sering mengikuti kegiatan sebagai *freelancer event* pada beberapa acara lokal maupun internasional.